



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 2 Martapura Telp. (0511) 4721504, Fax. (0511) 4721453 kodepos 70611
Website : www.bappeda.banjarkab.go.id E-Mail : bappeda_banjarkab@yahoo.go.id

Martapura, 22 Februari 2023

Nomor : 000.7.2.4/ 178 /PPE/Bappedalitbang
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Tenaga Ahli**

Kepada Yth.
Ketua LPPM UNISKA

di-
Tempat

Dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Banjar Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kab. Banjar Tahun 2023, dipandang perlu analisis dan telaahan dari tenaga ahli terkait Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah serta Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Berkenaan hal tersebut, kami mohon Bapak dapat menugaskan :

- Dr. Nurul Listiyani, S.H, M.H., C.Me.
- Rizka Zulfikar, S.Tp, MM
- Ir. Irfan, S.T., M.T

untuk menjadi tenaga ahli penyusunan dokumen dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Mujahid HP/WA 085249 333 156.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Banjar

H. MOHAMMAD RIZA DAULY, S.T., M.T.
Pembina TK. I
NIP. 19771018 200312 1 008



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

Kampus Utama: Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin-70123, Telp/Facs (0511) 3304352. www.uniska-bjm.ac.id

SURAT TUGAS

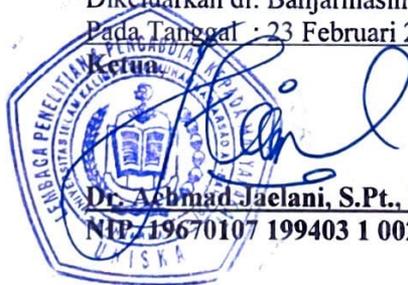
Nomor: 60/UNISKA-P2M/II/2023

Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/178/PPE/Bappedalitbang tentang Permintaan Tenaga Ahli, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin memberikan tugas kepada:

- Nama : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., C.Me. (Ahli Kebijakan Publik)
Rizka Zulfikar, S.TP., M.M. (Ahli Ekonomi)
Irfan, S.T., M.T. (Ahli Perencanaan Pembangunan)
- Pekerjaan : Dosen
- Keperluan : Melakukan Analisis dan Penelaahan Terkait Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Waktu Kegiatan : 23 Februari – 23 April 2023

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Banjarmasin
Pada Tanggal : 23 Februari 2023



Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.
NIP. 19670107 199403 1 002



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Martapura, 14 Februari 2023
Kepada Yth.

Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Banjar
di - Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.7.2.4/ 156 /PPE-Bappedalitbang

TENTANG
PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, harus disusun Renja PD Tahun 2024.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

- I. Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat antara lain program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021, hasil reviu Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dan RKPD.
- II. Agenda Penyusunan Renja PD tahun 2024 adalah sebagaimana dibawah ini :
 1. Tahapan penyusunan Renja PD meliputi:
 - (1) Persiapan penyusunan;
 - (2) Penyusunan rancangan awal;
 - (3) Penyusunan rancangan;
 - (4) Perumusan rancangan akhir;
 - (5) Penetapan.

2. Tahapan Persiapan Penyusunan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (1) dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2022, meliputi:
 - (1) penyusunan rancangan keputusan Kepala SKPD tentang pembentukan tim penyusun Renja PD;
 - (2) orientasi mengenai Renja PD;
 - (3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD;
 - (4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
3. Penyusunan rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud poin 1 angka (2) dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember 2022 sampai dengan minggu pertama bulan Januari 2023, meliputi:
 - (1) Rancangan awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.
 - (2) Hasil penyusunan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. penutup.
 - (3) Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPd.
4. Penyusunan Rancangan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (3) dilaksanakan mulai 20 Februari 2023, meliputi:
 - (1) Penyusunan Rancangan Renja PD adalah proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
 - (2) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada angka (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam poin 3 angka (2).
 - (3) Dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Serta disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

- (4) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang kabupaten paling lambat 10 Maret 2023 untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - (5) Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan Renja dimaksud untuk menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk selanjutnya dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Renja PD oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (6) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang.
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana poin 1 angka (4) merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD, meliputi:
- (1) Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
 - (2) Rancangan akhir Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud dalam poin 3 angka (2).
6. Penetapan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (5) meliputi:
- (1) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud dalam poin 5 angka (2), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi.
 - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin 6 angka (1) bertujuan untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
 - (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, bila ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja PD berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas.
 - (5) Rancangan akhir Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang.

- (6) Bappeda Litbang melakukan verifikasi seluruh rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud dalam poin 5 angka (1) dan angka (2) di atas paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja PD.
- (7) Bappeda Litbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (8) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
- (9) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (8) di atas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

III. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk:

1. Memperhatikan dan mempedomani Surat Edaran ini dalam hal penyusunan dokumen perencanaan.
2. Segera menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran ini dan hasil Forum Perangkat Daerah serta melaksanakan penginputan ke dalam aplikasi SIPD RI.
3. Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi bahan Penyusunan Rancangan Renja PD tahun 2024, dapat dilihat dan diverifikasi pada aplikasi SIPD Kemendagri melalui akun masing-masing.
5. Bagi Perangkat Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Daerah agar mengarahkan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG'S) sebagaimana terlampir.
6. Dalam menetapkan target kinerja, Perangkat Daerah agar menganalisis hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun lalu dengan memprioritaskan kegiatan yang pencapaiannya masih rendah serta proyek strategis yang termasuk di dalam Mayor Proyek.
7. Permasalahan-permasalahan atau kelemahan-kelemahan yang ditemui pada Tahun 2022 lalu menjadi bahan perbaikan perencanaan Tahun 2024, khususnya dalam penentuan lokasi sebuah pekerjaan. Selain itu juga perlu di susun kriteria-kriteria terukur dalam menentukan sebuah lokasi pekerjaan sehingga kegiatan yang dilakukan benar-benar menjadi pemecahan sebuah masalah, dan diharapkan pada saat pelaksanaan pekerjaan tidak ada lagi pergeseran lokasi.
8. Untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan Saya harap seluruh SKPD dapat berpikir inovatif sehingga muncul inovasi-inovasi yang dapat menunjang percepatan pencapaian target-target RPJMD.

9. Guna meminimalisasi ketidaktercapaian target-target kinerja baik di level kabupaten maupun level SKPD maka penerapan Manajemen Risiko harus dilakukan, untuk itu kepada Kepala Bappedalitbang bersama-sama seluruh asisten dan Inspektur diminta untuk dapat melakukan percepatan penyusunan Manajemen Risiko atau mengoptimalkan Tim SPIP.
 10. Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan instansi di Provinsi dan Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menyelaraskan Ranwal Renja 2024 dengan prioritas Provinsi dan Nasional.
 11. Rancangan Renja PD tahun 2024 yang sudah disempurnakan disampaikan kepada Bappeda Litbang dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat 14 Maret 2023 untuk di verifikasi dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.
 12. Menghadiri musrenbang RKPD tingkat Kabupaten yang pelaksanaannya direncanakan pada minggu IV (ke-empat) bulan Maret 2023
 13. Menyusun rancangan akhir Renja perangkat daerah sebagaimana poin II.6 dan menyampaikannya kepada Bappeda Litbang paling lambat (1 minggu setelah perkara RKPD ditetapkan untuk diverifikasi
 14. Aktif dan kooperatif dalam pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar baik dalam rangka penyusunan RKPD kabupaten maupun untuk penyusunan renja Perangkat Daerah Tahun 2024
- IV. Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dimaksud agar mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



MANIS

Ditandatangani secara elektronik
oleh:
BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.IKom



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI BANJAR

Nomor : 000.7.2.4/ 156 /PPE-Bappedalitbang

Tanggal : 14 Februari 2023

Tentang : Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Tahun 2021-2026. Tema Pembangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

“PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TANGGUH, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Dalam rangka mendukung dan mencapai tema pembangunan tahun 2024 tersebut dan dengan mempertimbangkan keselarasan target Indikator Makro Nasional, Indikator Makro Provinsi Kalimantan Selatan, maka target dan sasaran Pembangunan Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Target Indikator Makro Tahun 2024

Indikator	Realisasi 2022	Target 2022		Target 2023		Target 2024	
		RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RPJMD	RKPD
IPM	70,72	70,18	70,18	70,64	70,64	71,09	71,63
IPG	-	92,03	92,03	92,17	92,17	92,32	92,32
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,48	3,24	2,50%	3,42 5.02	2,80%	3,53	5.49
Pendapatan per Kapita (Rp)	-	20.882.000	20.882.000	21.177.050	21.177.000	21.628.000	21.628.000
Penduduk Miskin (%)	2,79	2,83	2,83	2,72	2,72	2,70	2,70
Pengangguran Terbuka (%)	2,72	3,13	3,13	3,09	0,312	3,06	2,66
Indeks Gini	0,300	0,313	0,313	0,312	3,12	0,311	0,298
IKLH	66.03	61,93	61,93	66,50	62,25	62,58	67,00

Sumber : Pengolahan Tim RKPD dan Ranwal RKPD Prov. Kalsel

Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD tahun 2024 agar mempedomani prioritas, sasaran, dan indikator pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, Prioritas RPJMN 2020-2024, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan, pencapaian SDG's, pencapaian SPM, hasil analisis Perumusan Rencana Kerja Prioritas RKPD 2024, dan hal lain sesuai arahan aturan yang lebih tinggi, yaitu :

I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANJAR

Sasaran RPJMD Kab. Banjar Tahun 2021-2026 pada tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran, Indikator, dan Target RPJMD Kab. Banjar

Sasaran	Indikator	Target 2024
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan	Indeks Kesehatan	74,15
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	Indeks Pendidikan	61,24
Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	78,53
Sasaran 1.1.4 : Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,39
Sasaran 1.1.5 : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,02
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,24
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas	75,46
Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	2,50%
	LPE sub sektor perikanan	3,88%
Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	2,07%
	Jumlah kunjungan wisatawan	4.500.000
Sasaran 2.2.1 : Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,06
Sasaran 2.2.2 : Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	42,34%
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	13,69%
Sasaran 2.2.3 : Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,90
Sasaran 2.2.4 : Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	20%
Sasaran 2.2.5 : Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6907
Sasaran 2.2.6 : Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	86,84%
Sasaran 2.2.7 : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	76,14
Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,526
Sasaran 3.1.2 : Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9,36%
Sasaran 3.1.3 : Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	149,6

Sasaran	Indikator	Target 2024
Sasaran 3.1.4 : Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup	Jumlah pelanggaran Lingkungan Hidup	0,00
Sasaran 4.1.1 : Terselenggaranya Reformasi sumber- sumber pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4%
Sasaran 4.1.2 : Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	76,32
	Nilai Opini BPK	WTP
Sasaran 4.1.4 :Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,31
Sasaran 4.1.5 : Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	65,50
Sasaran 4.1.6 :Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,40
Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat	0
Sasaran 5.1.2 : Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar;	Jumlah apresiasi Budaya Banjar	8
Sasaran 5.1.3 : Meningkatkan peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan Santri dalam Olahraga	69 medali
Sasaran 5.1.4 : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran perda dan trantibum	1,84

Progres Majar Project dan Proyek Strategis samoai dengan Tahun 2022 pada RPJMD Kab. Banjar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Proyek Strategis	Realisasi 2022
Pembangunan plaza pelayanan publik (MP)	2 Unit di Simpang Empat dan gambut
Pengembangan Infrastruktur TIK mendukung transformasi digital hingga desa (SMART KAMPUNG MANIS (MP)	1.262 Desa telah terhubung internet (dari total 277 Desa) 2.Anjungan Smart Kampung Manis sudah beroperasi di 2 desa: Desa Tiga Mataraman dan Desa Indrasari Martapura
Penataan Kawasan Wisata Religius Sekumpul (MP)	Segmen I telah selesai, Segmen II dan III masih penyusunan UKL-UPL
Penataan Perkotaan Martapura (MP)	Akan dikerjakan tahun 2023 (APBD/APBN)
Pembangunan Bendungan dan jaringan irigasinya (MP)	Dalam tahap pelepasan fungsi kawasan dari Kementerian ATR yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel
AIR SANTRI (MP)	Kegiatan fisik selesai 100%, saat ini berada pada masa pemeliharaan
Perluasan layanan dan akses cakupan kesehatan semesta (UHC)	69,46

Proyek Strategis	Realisasi 2022
Optimalisasi fungsi dan peningkatan kinerja RSUD	IKM : 88,17, Peningkatan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi "Paripurna" dan menjadi RS satelit/Pendidikan
Optimalisasi fungsi dan kinerja puskesmas rawat inap di kecamatan	4 PKM rawat inap
Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan membangun posyandu dan puskesmas di desa	43,8% Peningkatan Posyandu aktif
Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tenaga kesehatan di desa	ada 16 desa yg tidak ada bidan desanya
Penurunan Prevalensi Stunting	17,34
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada level A	Level CC
Sistem remunerasi yang lebih adil, dan kompetitif	
Akselerasi penerapan pemerintahan berbasis elektronik	2,56
Nilai akuntabilitas kinerja pada level A	Level B
Nilai Pengelolaan Keuangan yang WTP	WTP
Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi pada level 3	4,06
Penguatan permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (kurma manis)	242 Penerima pinjaman dengan total platform 1,25 Milyar (2021-2022)
Bantuan prasarana dan sarana kepada kelompok usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pemberian 35 ribu ekor bibit ikan patin dan 21 ribu ekor bibit ikan Nila 2.Pemberian 50 unit kolam terpal bundar. 3.Pemberian bantuan 21.190 kg pakan pembesaran dan 710 kg pakan untuk benih. 4.Dinas pertanian memberikan bantuan berupa pembangunan JIUT di 4 kecamatan 5.Pembangunan JUT 6.Rehabilitasi/renovasi kantor BPP 7.Pemberian alat pasca panen sebanyak 21 unit
Pembangunan pasar desa yang representatif di desa	ada 3 revitalisasi pasar desa yang refresentatif
Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional yang modern	belum ada, karena anggaran yang diperlukan sangat besar, direncanakan KPBU
Membangun pariwisata berbasis potensi daerah	1. Pembuatan rambu 9 unit ke arah destinasi wisata Monumen Divisi ALRI, Kec. Sungai Tabuk

Proyek Strategis	Realisasi 2022
	<p>2.Pemeliharaan Lansekap di Danau Tamiyang, Ds. Mandikapau Barat, Kec. Karang Intan</p> <p>3.Pengadaan gazebo sebanyak 6 unit, di Kec. Martapura Timur.</p>
Peningkatan jalan penghubung antar kawasan strategis	<p>1.Rehabilitasi jalan Banjarbaru - Simpang 3 Tahura – Aranio : 2400m</p> <p>2.Rehabilitasi Jalan Sungai Tabuk – Gambut : 2103 m</p>
Pembangunan sarana olah raga di desa	Pemeliharaan gedung Dojo, lapangan takraw RTH Demang Lehman
Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (formal/ non formal) melalui sertifikasi guru sebanyak 2.650 guru	<p>1.Guru Paud = 205</p> <p>2.Guru SD = 1.727</p> <p>3.Guru SMP = 626</p>
Peningkatan kesejahteraan guru agama (pesantren)	<p>1.Guru PAUD =1.050 orang</p> <p>2.Ponpes =1.202 orang</p> <p>3.Madrasah diniyah = 1.003 orang</p> <p>4.BKPRMI = 2.095 orang</p> <p>5.AI Banjari = 490 orang</p>
Bantuan beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi pelajar dan mahasiswa, khususnya masyarakat miskin	<p>1.PIP SD = 13.673 siswa</p> <p>2.PIP SMP = 1.914 siswa</p> <p>3.Alat tulis dan tas = 988 paket (utk 988 siswa)</p>
Pengembangan Rumah Al-Qur'an di desa	
Pendidikan vokasi berbasis potensi daerah berbasis kejuruan dan pesantren	
Menyelenggarakan even-even keagamaan dan kebudayaan Banjar	Pasar Wadai Ramadhan, Festival Sinoman hadrah, Festival Maulid Habsyi, Festival Busana Adat Banjar, Festival Rudat, Lomba kue tradisional, Hari Santri, Upacara Beyeun Maulid
Jalan mantap sepanjang 1.898 kilometer dan jembatan sebanyak 294 unit	Jalan kabupaten 586,72 km + jalan mantap poros desa 756,61 km = 1343,33 km/1940,58 (586,72+215,87+756,61+381,38(mantap tidak mantap kabupaten+mantap tidak mantap poros desa) 69,22 %
Jalan baru sepanjang 100 kilometer dan jembatan 10 unit	<p>1.Jalan Baru 15 km APBD</p> <p>2.Jalan Alternatif ke Makam Syech M. Arsyad Al-Banjari : 2,4 km (APBD provinsi) realisasi 2022 11,791 Km</p>

Proyek Strategis	Realisasi 2022
	3.Akses Mataraman – Sungai Ulin : 1 km (APBD provinsi) 4.Akses Mataraman – Sungai Ulin : 1 unit jembatan
Jalan Lingkungan permukiman mantap sepanjang 100 km	Jalan Komplek 2149,2 m, Jalan Lingkungan Kawasan kumuh : 314 m. Jalan lingkungan (Cipta Karya) 6,79 km
Peningkatan kinerja irigasi mendukung kenaikan produktivitas pertanian	6788,7 Ha
Fasilitasi penyediaan rumah umum sebanyak 1000	Fasilitasi Penyediaan perumahan umum: 2241 Unit
Peningkatan layanan akses sanitasi 10.000 SR	546 Unit
Peningkatan akses layanan air minum perpipaan 10.000 SR	1765 SR (PUPR) + 2031 (PDAM)
Peningkatan akses layanan air minum non-perpipaan 100 unit	11 unit *
Penyediaan 100 TPS tersebar di kecamatan	Bak Kontainer 6 unit, Landasan Kontainer 10 TPS , 4 TPS swadaya masyarakat
Perluasan bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa rehabilitasi rumah dan bantuan sosial lainnya seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pangan non-tunai	1.PKH = 13.527 KPM 2.BPNT = 25.667 KPM 3.PBI JKN = 4.Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (BSPS) : 1362 Unit (ada penambahan unit RTLH/direktif DPR RI) 5.Rehabilitasi RTLH (APBD): 15 Unit 6.Rehabilitasi Rumah Korban Bencana: 19 Unit 7.Rutilahu APBD = 14 unit 8.Rutilahu Baznas = 19 unit
Menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan baru sebanyak 15.000 lapangan pekerjaan	5.222 lapangan pekerjaan
Menyediakan 15.000 pelatihan kerja sesuai dengan potensi daerah	Melalui kegiatan SKPD yang bersumber dari APBD sebanyak 1.659 orang yang dilatih, program YESS yang bersumber dari APBN sebanyak 3.408 orang yang dilatih dan melalui Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDes sebanyak 1089 orang yang dilatih.. Dengan total penyediaan pelatihan tahun 2022 sebanyak 6.156 orang yang di latih

Proyek Strategis	Realisasi 2022
	<p>B. Realisas Penerima Manfaat (PM) Program YESS 3408 orang.</p> <p>D. Pelatihan Advanced Training komoditas pertanian sebanyak 132 orang.</p> <p>E. Peserta pelatihan BATUMBANG TANI MANIS sebanyak 1000 orang</p>

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

Arah Kebijakan Nasional dalam rangka mengatasi isu-isu Global, Nasional dan Lokal sebagai berikut:

ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU LOKAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasokan Pangan dan Energi ▪ Pembatalan Mobilitas ▪ Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Defisit APBN dan Investasi ▪ Rantai Nilai ▪ Daya Beli 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bencana ▪ Pemantapan Pemulihan Ekonomi ▪ Daya Beli ▪ Pengangguran ▪ Pemerataan

Untuk menjawab isu-isu tersebut, maka ditetapkan 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Dengan program prioritas :

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi

- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan major project Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- Pembangunan rendah karbon.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara INDONESIA (WNI) di luar negeri.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kalimantan

Secara kewilayahan disusun arah kebijakan pengembangan wilayah untuk Kalimantan sebagai berikut :

- Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi
- Memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional

- Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia
- Mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan Bagian Utara

Strategi pengembangan wilayah Kalimantan

Strategi pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan wilayah di Kalimantan melalui strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.

a. Strategi pertumbuhan

- Membangun IKN dan infrastruktur pendukungnya.
- Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis.
- Mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu sawit, karet, dan perikanan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok.
- Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya.
- Mengembangkan sentra produksi pangan (food estate) dengan didukung korporasi petani.
- Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Kalimantan.
- Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

b. Strategi pemerataan

- Memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi dengan jaringan Trans Kalimantan.
- Mengembangkan kota-kota sedang sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal.
- Mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, dan PKSN Long Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara.
- Mempercepat penuntasan SPM, terutama di wilayah 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial
- Peningkatan kualitas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa melalui Penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Kalimantan serta penguatan fungsi dan peran GWPP guna mendorong peningkatan daya saing daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik.

- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan
- pendidikan, kesehatan, dan balai-balai latihan kerja.
- Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan ketangguhan terhadap ancaman bencana, serta mempertahankan pelestarian

III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengatasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Lingkungan Hidup
Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana (banjir dan kebakaran hutan lahan).
- b. Infrastruktur
Belum mantapnya infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi (termasuk energi dan konektivitas)
- c. Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia
- d. Ekonomi
Belum terdiversifikasinya sektor ekonomi di Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi struktur ekonomi daerah (pertanian, pariwisata, hilirisasi komoditas unggulan, dan pelaku UMKM)
- e. Tata Kelola Pemerintahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital
- f. Gerbang Ibu Kota Negara Baru dan Food Estate
Kalimantan Selatan memiliki peluang besar menjadi gerbang food estate di Kalteng dan ibu kota negara di Kaltim (jalur logistik dan *konektivitas*)

Tema Pembangunan yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah:

“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal dengan target pembangunan ekonomi yang tumbuh secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU”.

Tema tersebut di jabarkan melalui beberapa prioritas sebagai berikut:

- 1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata**, dengan sub prioritas, yakni:
 - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
 - f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN

- 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing**, dengan sub prioritas:
 - a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - c. Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Dan Inklusif
 - d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - e. Pengendalian Prevalensi Stunting
 - f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - g. Peningkatan Prestasi Olahraga
 - h. Pengembangan Budaya Daerah

- 3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah**, dengan sub prioritas :
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
 - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN

- 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik**, dengan sub prioritas :
 - a) Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
 - c) Pelaksanaan Pilkada Serentak
 - d) Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
 - e) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - f) Pengembangan Satu Data Kalsel

- 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana**, dengan sub prioritas :
 - a) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b) Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

IV. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG'S)

Kewajiban Daerah lainnya didalam perencanaan pembangunan adalah mempertimbangkan pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals). Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17

tujuan dengan 169 capaian yang terukur dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia. OPD agar memprioritaskan program dan kegiatan mendukung pencapaian SDG's. 17 Tujuan SDG's adalah:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajarseumur hidup untuk semua
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
- 6) Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- 7) Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- 10) Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- 11) Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi deserti kasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
- 16) Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penerapan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD harus memprioritaskan kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM yaitu:

1. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Pendidikan
 - a. Pendidikan Dasar : Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
 - b. Pendidikan Kesetaraan : Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini : Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
2. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Kesehatan
 - a. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin : Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita : Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan
 - e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar : Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif : Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut : Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi : Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus : Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat : Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis : Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan : Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.
3. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari : Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

4. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana : Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni.
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten : Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
5. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Trantibumlinmas
 - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Sosial
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti : Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti : Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti : Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti : Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana : Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

VI. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar disusun dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan isu-isu strategis ditingkat lokal, serta dalam upaya memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Banjar berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

- a) Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai secara optimal.
 - Ekonomi sektor industri pengolahan yang fluktuatif dan belum tumbuh dan berkembang optimal.
 - Pertumbuhan investasi yang belum optimal.
 - Sektor pariwisata belum tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dan destinasi wisata yang dikembangkan.
 - Produksi dan produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan) belum dikembangkan dengan optimal berdasarkan pada potensi yang tersedia.
 - Penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi dan sinergitas.
 - Kondisi perekonomian global yang memiliki kecenderungan pada terjadinya krisis ekonomi global.
 - Krisis pangan dan energi yang mengancam seiring dengan terjadinya bencana dan kondisi ekonomi global.
 - Kondisi perekonomian yang kurang stabil berdampak pada kecenderungan terjadinya Inflasi yang tinggi.
 - Clusterisasi produk unggulan daerah belum berjalan dengan baik.
- b) Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu didorong dengan optimal.
 - Cakupan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang masih rendah.
 - Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan angka RLS masih belum optimal.
 - Kecenderungan terjadinya risiko Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) yang masih cukup tinggi.
 - Kecenderungan terjadinya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta prevalensi stunting yang masih cukup tinggi
 - Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak masih belum terselenggara secara optimal.
- c) Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur layanan dasar yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan belum terpenuhi secara optimal.
 - Masih terdapat backlog terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dasar, seperti rumah layak huni, air bersih, air limbah, dan lainnya.
 - Kemantapan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan poros desa belum tertangani secara optimal.
 - Pengelolaan sektor persampahan yang belum dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
 - Pengelolaan kebencanaan daerah yang belum dilakukan secara holistik dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku

- kepentingan, baik itu antar lembaga pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat/ komunitas.
- Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal, baik dari aspek kualitas air, kualitas udara, maupun tutupan lahan.
 - Upaya pengendalian lingkungan akibat perubahan iklim belum optimal dilaksanakan.
- d) Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik dan bersih belum dilaksanakan secara optimal.
- Penyelenggaraan pelayanan publik yang melayani, baik secara digital maupun non digital belum optimal dilaksanakan
 - Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara intensifikasi maupun diversifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan.
 - Penyelenggaraan informasi dan statistik melalui manajemen satu data belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditentukan.
 - Penyelenggaraan pemerintahan, berbasis kinerja dan manajemen resiko yang belum terinternalisasi secara optimal.
 - Peningkatan koordinasi di tingkat kecamatan dan di tingkat desa masih perlu dioptimalkan dalam upaya mendukung percepatan pencapaian target indikator, khususnya pada wilayah kecamatan dan desa yang menjadi lokus kegiatan.
- e) Penguatan karakter agamis, dan kehidupan masyarakat yang demokratis masih perlu didorong dan ditingkatkan.
- Penguatan karakter religius masih perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan event keagamaan dan event budaya.
 - Kesadaran demokratis masyarakat yang masih rendah, khususnya ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 - Kecenderungan meningkatnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjau dari angka kriminalitas yang cukup tinggi.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa isu strategis diatas, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2024, yakni sebagai berikut:

PRIORITAS 1

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sub prioritas :

1. Peningkatan investasi di Kabupaten Banjar melalui realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan.
2. Pengembangan pariwisata yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik lokal, regional maupun internasional.
3. Mengembangkan ekonomi kreatif yang mampu mendorong peningkatan UMKM berbasis sumber daya lokal dan digital.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mampu mendorong ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan.

5. Penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program komplementer, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor terkait, dan penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.
6. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam upaya penguatan pasar lokal.
7. Peningkatan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mandiri berbasis potensi dan sumber daya lokal.
8. Penajaman strategi ekspor dan impor dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.

PRIORITAS 2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing, dengan sub prioritas :

1. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya pada angka partisipasi terhadap Sekolah Menengah Pertama.
2. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, khususnya pada layanan preventif dan edukatif bagi, remaja putri, ibu hamil dan menyusui.
3. Peningkatan upaya pencegahan pernikahan anak melalui edukasi dan advokasi bagi orangtua dan anak.
4. Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kader dan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
5. Peningkatan cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui strategi yang kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan.
6. Mendorong penyediaan pangan, khususnya penyediaan pangan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau.
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

PRIORITAS 3

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sub prioritas:

1. Peningkatan layanan infrastruktur dasar yang mendorong pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
2. Peningkatan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.
3. Peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan pembangunan berbasis kawasan strategis (prioritas) dan perdesaan yang mendorong pemerataan ekonomi wilayah.
5. Peningkatan pengelolaan kebencanaan berbasis mitigasi dan rehabilitasi yang sinergi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan.

PRIORITAS 4

Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi, dengan sub prioritas :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sektor-sektor pendapatan.
3. Pengembangan Satu Data untuk pembangunan dan informasi statistik.
4. Peningkatan Kompetensi ASN sebagai upaya terwujudnya ASN yang profesional dan BERAKHLAK.
5. Penerapan Sistem renumerasi yang lebih adil dan kompetitif.
6. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi.

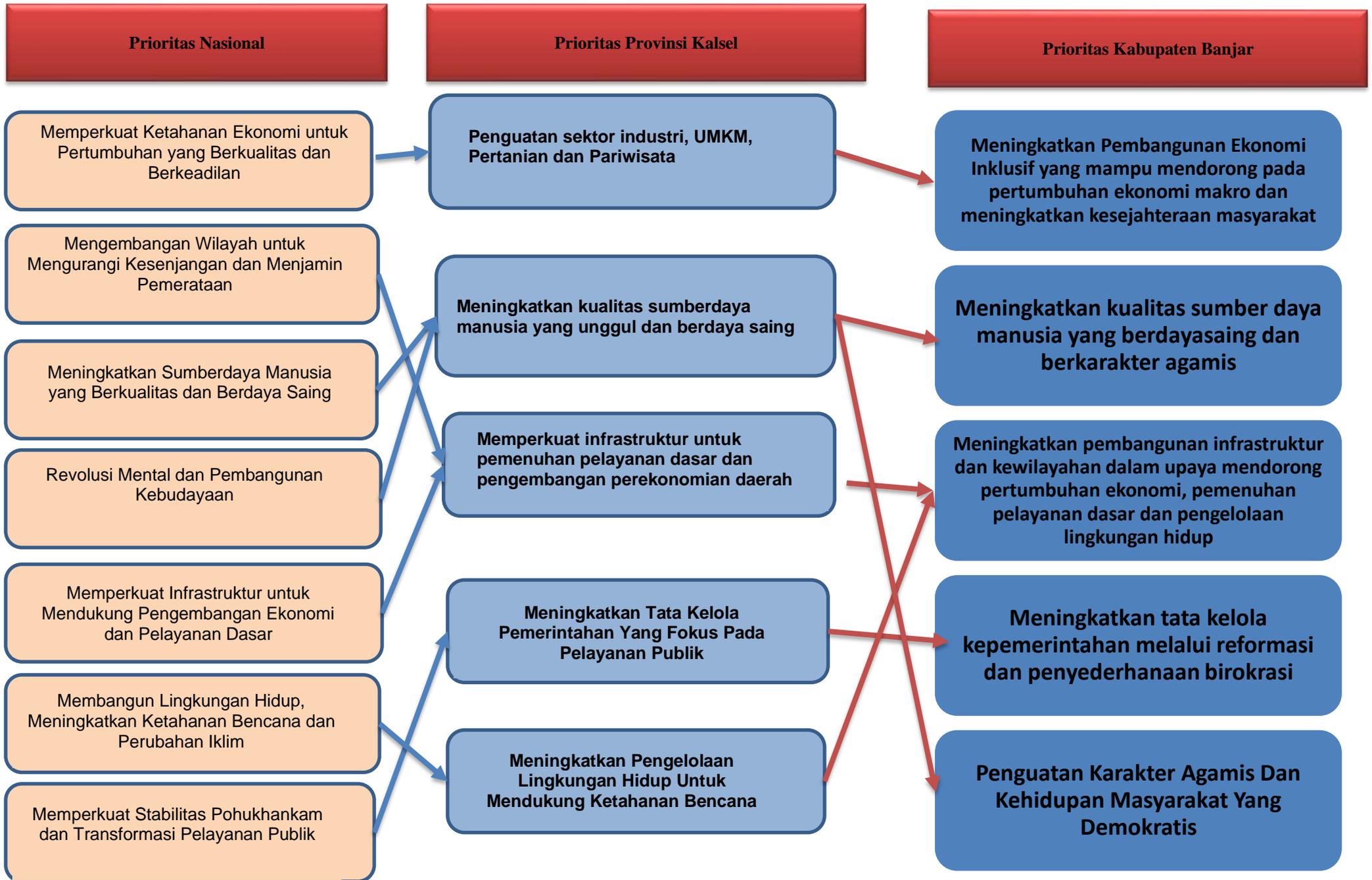
PRIORITAS 5

Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan penyelenggaraan even keagamaan dan kebudayaan dalam upaya mendorong karakter religius dan agamis.
- 2) Pembentukan pemuda berkarakter
- 3) Peningkatan partisipasi pemuda dan santri dalam pembangunan daerah dan olahraga.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah
- 5) Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan Prioritas Daerah (Kabupaten Banjar) dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

SINKRONIKASI PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN 2024



Selanjutnya prioritas diatas diimplementasikan melalui program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM TAHUN 2024

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	18,75%	DKUMPP
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9,00%	DKUMPP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	92,49%	DKUMPP
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	10,00%	DKUMPP
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	8,39%	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan produktivitas komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura unggulan	1,12%	DISTAN
			Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan	0,10%	DISTAN
			Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	2,70%	DISTAN
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	77,00%	DISTAN
			Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan	20,00%	DISTAN
			Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar	0,31%	DISTAN
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri	4,30%	DISTAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	54,923	DKPP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	61,02	DKPP
			Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan	8,00%	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase destinasi wisata yang representatif	52,00 %	DISBUDPORAPAR
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	10%	DISBUDPORAPAR

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target	Penanggung Jawab
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.21.189	DISNAKER
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	27,00%	DISNAKER
		Program Pemberdayaan Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	100%	DINSOS,P2KBP3A
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	15,75%	DINSOS,P2KBP3A
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	60%	DINSOS,P2KBP3A
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	62,44%	DINSOS,DP2KBP3A
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	4,33%	DPMD
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	62,09%	DPMD
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	87,45%	DPMD
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing				
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Harga Pangan	≤15	DKPP
			Ketersediaan Pangan Utama	34,84%	
			Skor PPH Konsumsi	76,74%	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00%	DINKES
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	88,00%	DINKES
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah (APS) SD	99,88%	DISDIK
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP	89,00%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100 %	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	89,80%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,32%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	80,10%	

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target	Penanggung Jawab
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	64,74	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru - Siswa PAUD	18,00	
			Rasio Guru - Siswa jenjang SD	12,84	
			Rasio Guru - Siswa jenjang SMP	10,33	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks PUG	0,6375	DINSOS,P2KBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	20%	DINSOS,P2KBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga berkualitas	15,00%	DINSOS,P2KBP3A
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	73,54%	DPUPRP
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase	46,41%	DPUPRP
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	82,64%	DPUPRP
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	82,27%	DPUPRP
			Persentase Akses Sanitasi Aman	8,15%	
			Persentase Akses Sanitasi Layak	82,27%	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	74,67%	DPUPRP
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,18%	DPUPRP
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang	100,00%	DPUPRP
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	70,15%	DISHUB
			Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75,00%	
			V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,38	
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan	100,00%	DISPERKIM LH
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	20,23%	DISPERKIM LH
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24,30%	DISPERKIM LH

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target	Penanggung Jawab
		Program Penanggulangan Bencana	Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,39	BPBD
			Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana	0,68	
			Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0,54	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran Air	5,2	DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	100,00%	DLH
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	96%	BAPENDA
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,27%	DISDUKCAPIL
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	89,00%	DISDUKCAPIL
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00%	DPMPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	20,00%	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	9,53%	DISPERSIP
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	82,60	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100%	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	60	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	75	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas	100%	SEKRETARIAT DPRD
			Persentase fasilitasi pelaksanaan reses	100%	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	83,00%	RSUD RATU ZALECHA
			Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar	80,00%	

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target	Penanggung Jawab
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	Kecamatan
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	100%	BAPPEDALITBANG
			Persentase Perencanaan Daerah yang Selaras	100%	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	78,15	BAPPEDALITBANG
			Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA	79,02	
			indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	75,03	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	90,73%	BKPAD
			Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	98,14%	
			Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	87,03%	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	88,88%	BKPAD
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	76	INSPEKTORAT
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4,30	INSPEKTORAT
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	42,20	BKDPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kompetensi	23,30	BKDPSDM
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	0,71	DISKOMINFO
		Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	44,71%	DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	190	DISKOMINFO

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target	Penanggung Jawab
5		Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	0,120%	KESBANGPOL
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	0,23%	KESBANGPOL
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	66,67%	DISBUDPORAPAR
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	38,75%	DISBUDPORAPAR
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Penanganan Terhadap Tramtibum, Perda/Perkada dan LinMas	100%%	SATPOL PP, DPKPP

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Banjar baik dalam perencanaan maupun implementasinya diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

A. Arah Kebijakan Nasional

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tema yang diusung adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini menggarisbawahi pentingnya sektor produktif untuk melakukan reformasi dan transformasi, sehingga kinerjanya akan terus meningkat. pertumbuhan ekonomi di 2024 diperkirakan akan berada dalam kisaran 5,7%-6,0%,

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2024, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar Sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan

Tahun 2024 diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.



Sumber: Bappenas

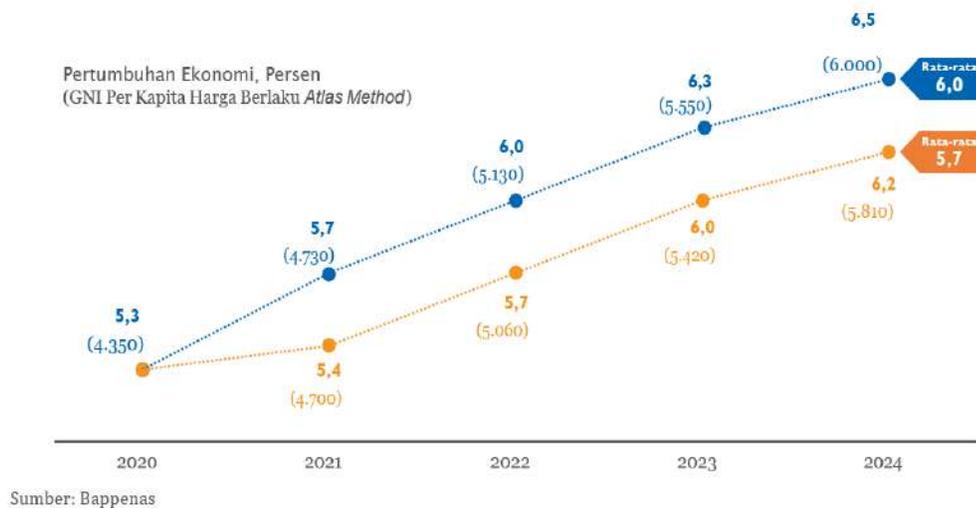
Gambar 3.1
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka

menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

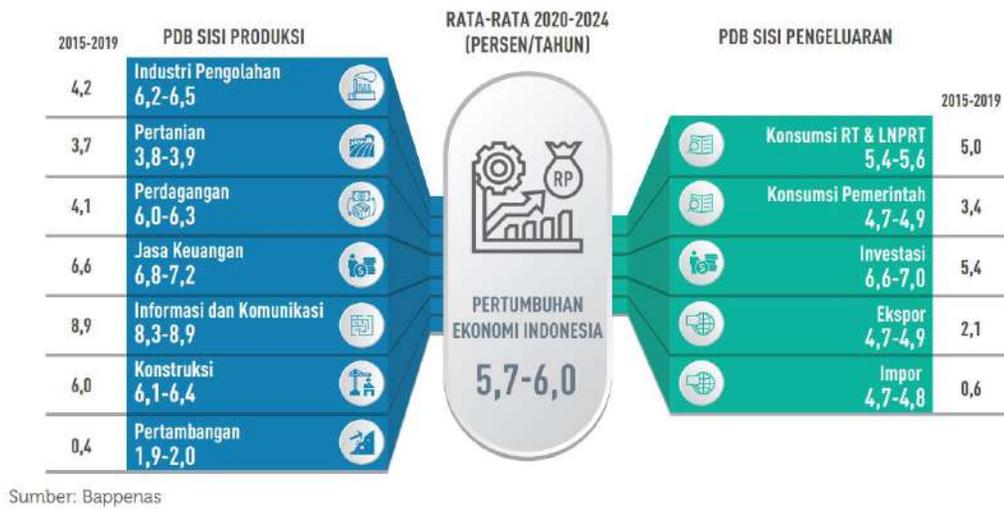
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi. Perbaikan kondisi makro yang dilakukan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan.

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54.



Gambar 3.2
Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diharapkan akan mampu tumbuh 5,7–6,0 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2024 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2024 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh sebesar 6,6 –7,0 persen. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (1) peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (2) peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan (3) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem One Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem One Single Submission (OSS) di daerah.



Gambar 3.3
Rincian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif mencapai 5,4 –5,6 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemic COVID-19 yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi. Selain itu, membaiknya perekonomian juga mendorong tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7 – 4,9 persen, sehingga tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3 persen per PDB.

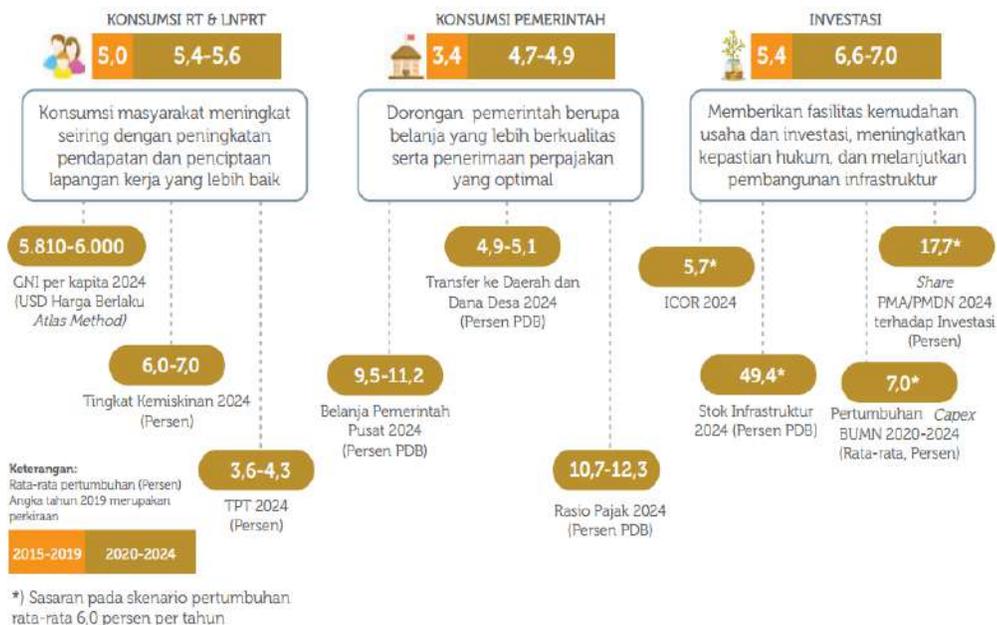
Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 4,7 – 4,9 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 4,7 – 4,8 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, ekspansi jasa keuangan, penguatan sektor informasi dan komunikasi, konstruksi dan perdagangan dalam negeri.

Di sisi lapangan usaha, subsektor industri diperkirakan dapat mengalami pemulihan secara bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 6,2–6,5 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2024 antara lain (a) pemulihan industri makanan dan minuman seiring dengan pemulihan mobilitas dan daya beli masyarakat; (b) pemulihan daya beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (durable); (c) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri; (d) peningkatan utilisasi produksi; (e) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; serta (f) percepatan transisi penerapan industri hijau.

Di sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT) diharapkan tumbuh rata-rata 5,4-5,6 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan

lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran. Konsumsi pemerintah tumbuh rata-rata 4,7-4,9 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 49,4 persen PDB pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi (Gambar 3.3).



Sumber: Bappenas

Gambar 3.4

Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan Domestik

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa (Gambar 3.4).



Gambar 3.5
Sasaran PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan

Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 4,7-4,9 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor utamanya dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sementara impor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 4,7-4,8 persen per tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 1,7 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD159,5 miliar pada tahun 2024 (gambar 3.5).

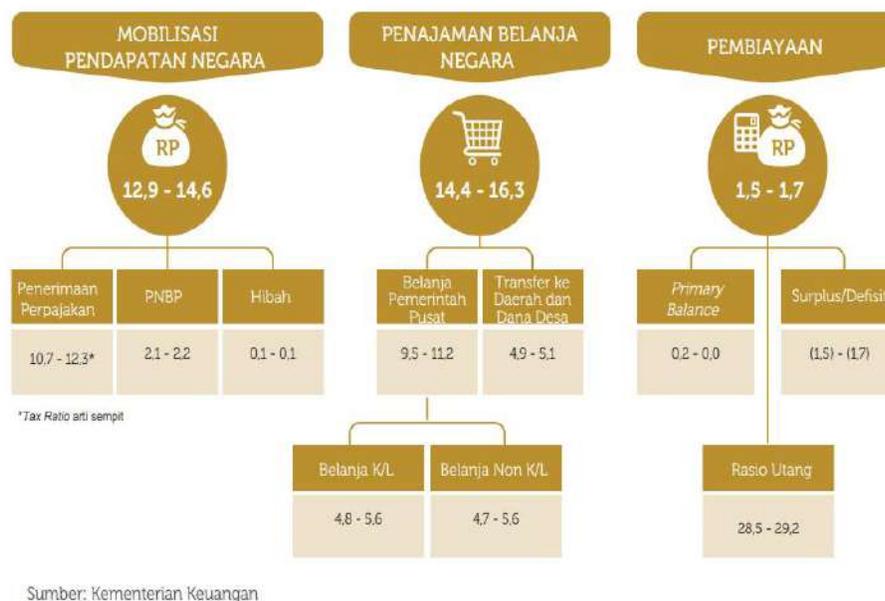


Sumber: Bappenas

Gambar 3.6
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi 12,9-14,6 persen PDB pada tahun 2024, dengan rasio perpajakan mencapai 10,7-12,3 persen pada tahun 2024. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan perpajakan. Dari sisi administrasi, terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah terus melakukan penggalan potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara, reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif cukai Hasil Tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, dan ekstensifikasi barang kena cukai. Kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara diperkirakan meningkat menjadi 14,4 - 16,3 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masing- masing meningkat menjadi 9,5-11,2 dan 4,9 - 5,1 persen PDB pada tahun 2024. Defisit akan dijaga pada 1,5 - 1,7 persen PDB pada tahun 2024, berada di bawah batas defisit yang diamanatkan oleh undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB (Gambar 3.7).



Gambar 3.7
 Sasaran Keuangan Negara Tahun 2024 (Persen PDB)

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data/statistik.

Sepanjang tahun 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia; (iii) kecukupan likuiditas; (iv) pendalaman pasar keuangan; (v) penurunan defisit transaksi berjalan; serta (vi) sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

B. Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Gambaran ekonomi global terutama mitra dagang Indonesia dan khususnya negara utama tujuan ekspor Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kunci bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dan 2024. Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah ketika terjadi resesi di negara - negara tujuan ekspor Provinsi Kalimantan Selatan maka permintaan terhadap barang – barang ekspor Kalimantan Selatan juga berpotensi menurun seperti Batu Bara yang merupakan sektor terbesar perekonomian Kalimantan Selatan di tengah sebenarnya harga energi yang terus meningkat.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diproyeksikan akan melanjutkan pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya yang perlahan mulai tumbuh positif. Pertumbuhan LPE yang diperkirakan terbesar di tahun 2024 pada sisi pengeluaran adalah ekspor dan impor barang dan jasa. Masing masing diperkirakan akan memberikan pertumbuhan sebesar 13,07%- 13,61% dan 9,95%-10,37%,

Pertumbuhan tahun 2024 untuk konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah diharapkan dapat tercapai masing-masing sebesar 0,68%-0,95%, 0,68%-0,81%, dan 0,20%-0,25%. Dilihat dari distribusi komponen terhadap PDRB ADHB, komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan masih cukup besar yakni masing-masing sebesar 43,34%-47,05% dan 11,14%-12,21%. Share dari Komponen PMTB diperkirakan akan menurun dari angka 25,60% menjadi 25,34% sampai dengan tahun 2024.

Pada sisi penawaran atau lapangan usaha, sumber pertumbuhan LPE diperkirakan terbesar di tahun 2024 adalah sektor pertambangan (1,10-1,24%), perdagangan besar dan eceran (0,71%-0,77%), transportasi dan pergudangan (0,65%-0,69%), dan sektor industri pengolahan (0,62%-0,69%).

Apabila dilihat distribusi terhadap PDRB ADHB, pada tahun 2023 dan 2024 sektor Pertambangan diperkirakan dapat terjaga masing-masing sebesar 28,43% dan menaik ditahun 2024 menjadi 29,06%-30,15% dengan asumsi terjadi peningkatan permintaan dan perbaikan harga komoditas batu bara, dan CPO meskipun fluktuatif, diperkirakan berdampak pada distribusi sektor Pertanian dan Industri Pengolahan tahun 2024 masing-masing akan tertahan di angka 10,83%-11,02% dan 12,29%-12,57%.

Tabel 3.3. LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2024 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
			Growth (%)				Source of Growth (SOG) (%)					
	2021	2022	2022	2022	2024	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2024
			Base-line	Mode-rate	High					Base-line	Mode-rate	High
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,17	0,879	0,83	1,04	1,34	1,64	0,16	0,12	0,11	0,13	0,17	0,21
2. Pertambangan dan penggalian	4,31	5,186	3,63	4,47	4,77	5,07	1,06	1,28	0,89	1,10	1,17	1,24
3. Industri pengolahan	6,23	3,428	3,45	4,93	5,23	5,53	0,78	0,44	0,43	0,62	0,65	0,69
4. Pengadaaan listrik, gas	6,66	6,312	4,73	6,43	6,73	7,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,03	4,441	4,01	4,26	4,56	4,86	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6. Konstruksi	2,87	3,298	3,75	3,94	4,24	4,54	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,34
7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	2,2	8,211	7,82	7,33	7,63	7,93	0,20	0,74	0,73	0,71	0,74	0,77
8. Transportasi dan pergudangan	1,81	16,8	8,03	9,58	9,88	10,18	0,11	0,98	0,52	0,65	0,67	0,69
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,3	10,48	7,01	9,13	9,43	9,73	0,05	0,21	0,15	0,20	0,20	0,21
10. Informasi dan komunikasi	7,22	7,695	6,29	6,49	6,79	7,09	0,30	0,34	0,28	0,30	0,31	0,32
11. Jasa keuangan	1,19	-1,44	1,24	2,05	2,35	2,65	0,04	0,05	0,04	0,06	0,07	0,08
12. Real estate	5,29	5,385	5,17	5,46	5,76	6,06	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15
13. Jasa perusahaan	3,62	7,308	6,24	6,55	6,85	7,15	0,02	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,32	2,519	1,75	2,05	2,35	2,65	0,08	0,13	0,09	0,10	0,12	0,13
15. Jasa pendidikan	1,54	4,561	4,23	3,98	4,28	4,58	0,07	0,21	0,19	0,18	0,20	0,21
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	11,59	4,656	4,39	4,23	4,53	4,83	0,22	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10
17. Jasa lainnya	1,16	5,16	3,36	3,91	4,21	4,51	0,01	0,06	0,04	0,04	0,05	0,05
PDRB ADHK 2010	3,48	5,01	4,04	4,67	4,97	5,27	3,48	5,01	4,04	4,67	4,97	5,27

Tabel 3.4. Share PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2024 Menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha	Share (%)					
	2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Base-line	Mode-rate	High
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,93	12,12	11,39	10,83	10,90	11,02
2 Pertambangan dan Penggalian	19,37	26,35	28,43	29,06	29,70	30,15

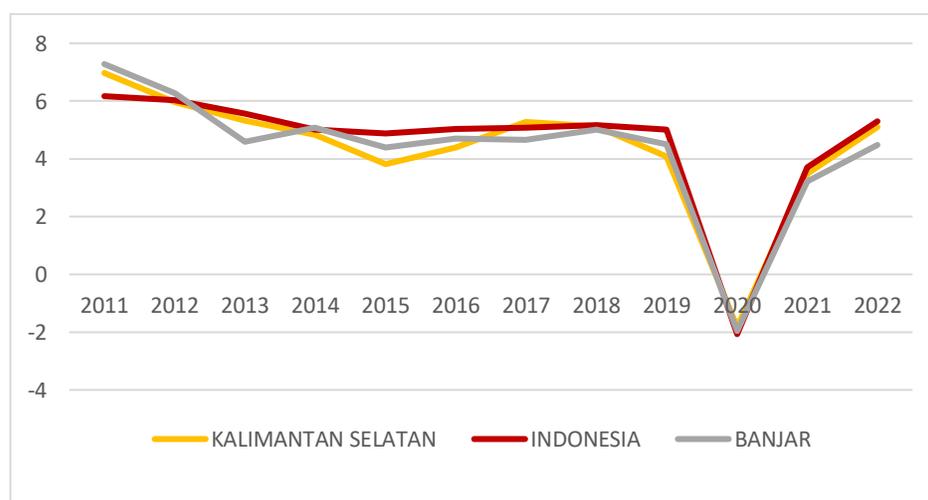
3	Industri Pengolahan	13,95	12,97	12,50	12,29	12,20	12,57
4	Pengadaan Listrik. Gas	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,44	0,39	0,37	0,37	0,36	0,36
6	Konstruksi	8,17	7,40	7,20	7,21	7,10	6,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,28	9,91	9,84	10,03	9,90	9,72
8	Transportasi dan Pergudangan	6,29	6,69	6,75	6,95	6,89	6,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,08	1,94	1,90	1,90	1,88	1,85
10	Informasi dan Komunikasi	3,94	3,61	3,53	3,53	3,49	3,42
11	Jasa Keuangan	3,60	3,15	2,99	2,92	2,87	2,81
12	Real Estate	2,43	2,16	2,08	2,06	2,03	1,99
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63
14	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,09	5,24	4,96	4,84	4,76	4,66
15	Jasa Pendidikan	4,91	4,32	4,16	4,13	4,06	3,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,36	2,05	2,00	1,97	1,98	1,93
17	Jasa lainnya	1,28	1,16	1,13	1,12	1,11	1,03
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

C. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Banjar

C.1. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Banjar Review Tahun 2022

C.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

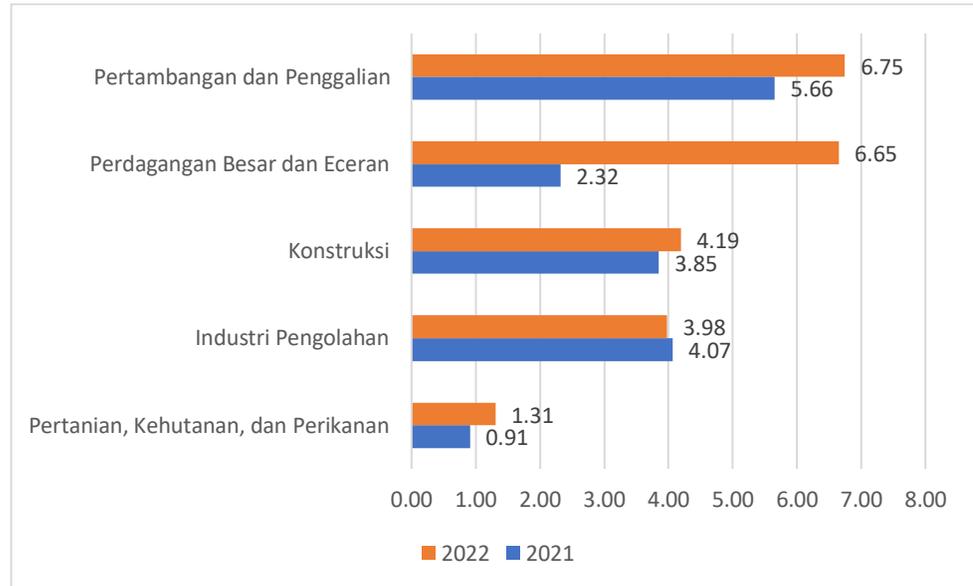
Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Banjar dapat dikatakan masih selaras dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi propinsi Kalimantan Selatan (Gambar 3.8).



Gambar 3.8. LPE Nasional, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar (2011-2022)

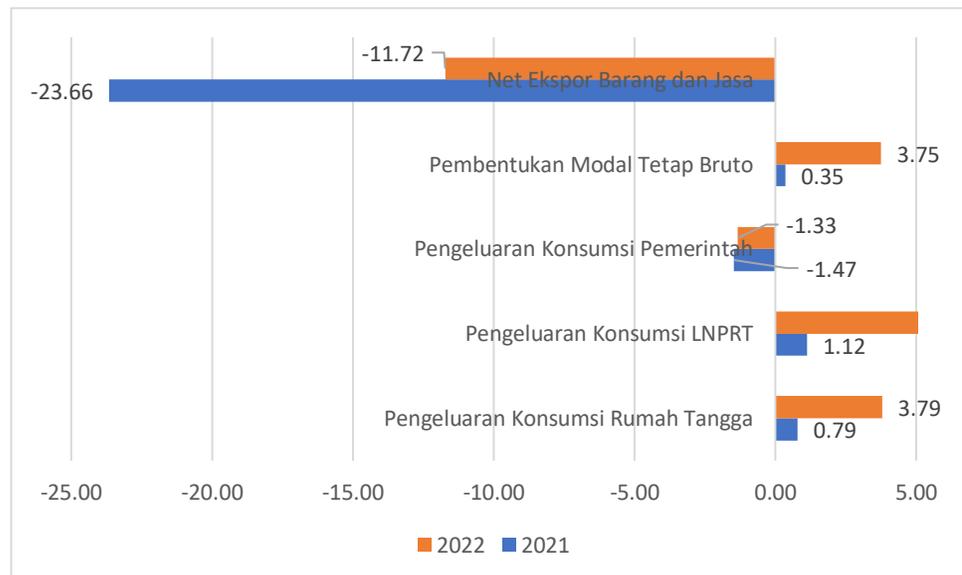
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pulih sebesar 4,48 persen. Dimana dari sisi produksi, 5 sektor utama tumbuh positif

antara lain di sektor pertambangan (6,75 persen), disusul perdagangan besar (6,65 persen), Konstruksi (4,19 persen), Industri Pengolahan (3,98 persen) dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,31 persen). Pertumbuhan ekonomi 5 sektor utama di Kabupaten Banjar disajikan pada gambar



Gambar 3.9. Pertumbuhan ekonomi 5 sektor utama Kabupaten Banjar (2011-2022)

Jika dilihat dari Sisi pengeluaran, pada tahun 2022 pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (5,12 persen) dan di susul oleh Pembentukan Modal tetap bruto (3,75 persen) yang disajikan pada gambar 3.9.



Gambar 3.9. Pertumbuhan ekonomi Sisi Pengeluaran (2011-2022)

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2022 disebabkan karena adanya aktivitas pertambangan yang masif menggerakkan pertumbuhan Ekspor dari sisi Pengeluaran Kab. Banjar tahun 2022. Hal ini juga terjadi karena adanya aktifitas Pemulihan

ekonomi nasional dan global yang mendorong permintaan pasokan batubara (ekspor LN dan AP) dari Kalimantan Selatan, salah satunya dari Kab. Banjar. Peningkatan ini mendorong pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kab. Banjar selama tahun 2022.

Tabel 3.5. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2022 dan Outlook Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sisi Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	Realisasi 2022	Outlook 2023
Pertanian,	1,31	0,25 – 0,83
Pertambangan	6,75	0,04 – 3,98
Industri	3,98	0,54 – 0,69
Listrik dan Gas	7,74	5,54 – 6,51
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,85	5,59 – 6,52
Konstruksi	4,19	2,10 – 2,60
Perdagangan	6,65	13,85 – 14,18
Transportasi dan Pergudangan	5,06	1,19 – 1,46
Akomodasi MaMin	7,77	9,15 – 14,72
Infokom	6,13	2,81 – 3,23
Jasa Keuangan	-0,87	5,07 – 5,77
Real Estat	4,69	0,12 – 0,99
Jasa Perusahaan	6,18	8,13 – 9,52
Adm. Pemerintahan,	0,51	12,78 – 13,17
Jasa Pendidikan	3,36	8,85 – 11,01
Jasa Kesehatan	6,33	4,85 – 6,01
Jasa lainnya	6,08	4,82 – 8,21
PDB	4,48	4,29 – 5,73

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan yang optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar juga diselaraskan terhadap kebijakan tersebut. Pada tahun 2024 proyeksikan dapat tumbuh sebesar 3,42 - 4,51 persen melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 2.80 persen. Pada sisi penawaran atau lapangan usaha, sumber pertumbuhan LPE didukung oleh semua kategori produksi, lebih rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2022 dan Outlook Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sisi Pengeluaran

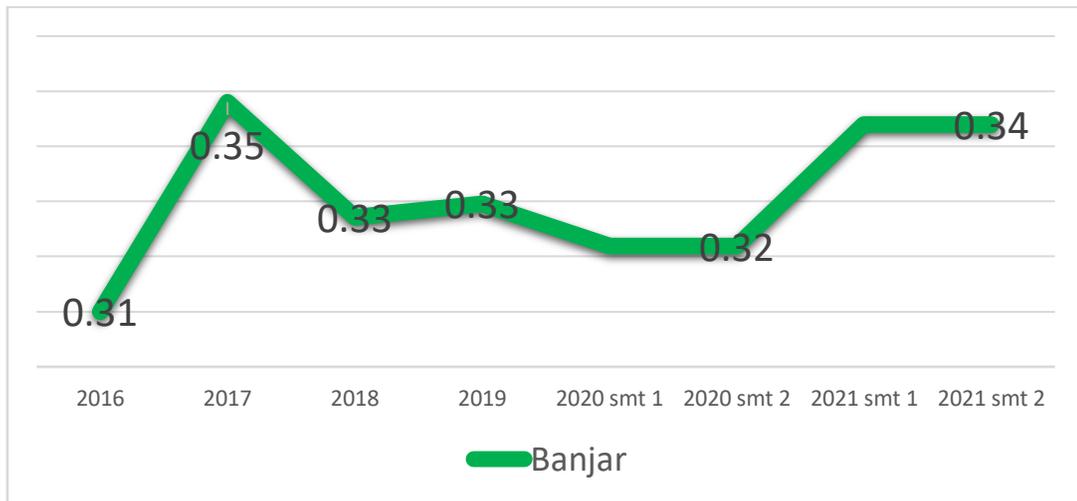
Komponen Pengeluaran	Realisasi 2022	Outlook 2023
Konsumsi Rumah Tangga	3,79	4,54 - 5,46
Konsumsi LNPRT	5,12	3,36 - 4,57
Konsumsi Pemerintah	-1,33	4,15 - 7,18
Investasi/PMTB	3,75	5,92 - 7,98
Ekspor Barang dan Jasa	-816,28	0,07 - 2,81
Impor Barang dan Jasa	-11,72	13,00 - 14,39
PDB	4,48	4,29 – 5,73

C.1.2. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran Ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kriteria koefisien gini didasarkan atas 3 kriteria yaitu

- 0 < GR < 0,3 : Ketimpangan Rendah
- 0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : Ketimpangan Sedang
- 0,5 < GR < 1 : Ketimpangan Tinggi
- GR = 1 : Ketimpangan Sempurna

Gambar Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2022

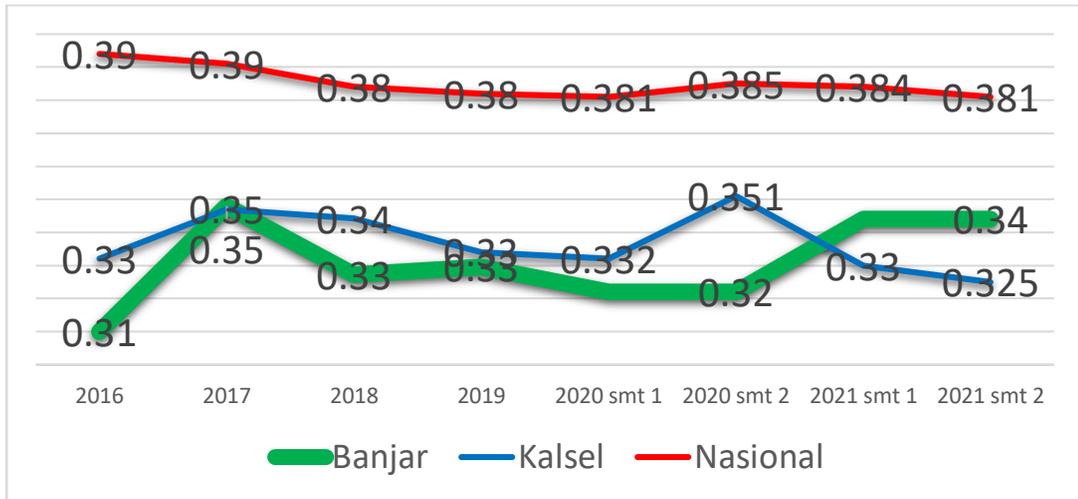


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Koefisien gini Kabupaten Banjar pada tahun 2016 di angka 0,31. Pada tahun 2017 koefisien gini Kabupaten Banjar naik di angka 0,35. Tahun 2018 koefisien gini Kabupaten Banjar naik di angka 0,33. Pada tahun 2019 koefisien gini Kabupaten Banjar turun di angka 0,33. Pada tahun 2020 koefisien gini Kabupaten Banjar menurun pada angka 3,22. Maka berdasarkan capaian dalam 5 tahun terakhir, koefisien gini di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa berada di kriteria ketimpangan sedang.

Dibandingkan dengan capaian Nasional dan Prov. Kalimantan Selatan, maka selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2022 capaian indeks gini kabupaten banjar sangat baik selalu dibawah provinsi dan nasional, lebih rinci dapat dilihat pada tabel gambar berikut.

Gambar 2. 1. Perkembangan Indeks Gini Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2022



Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

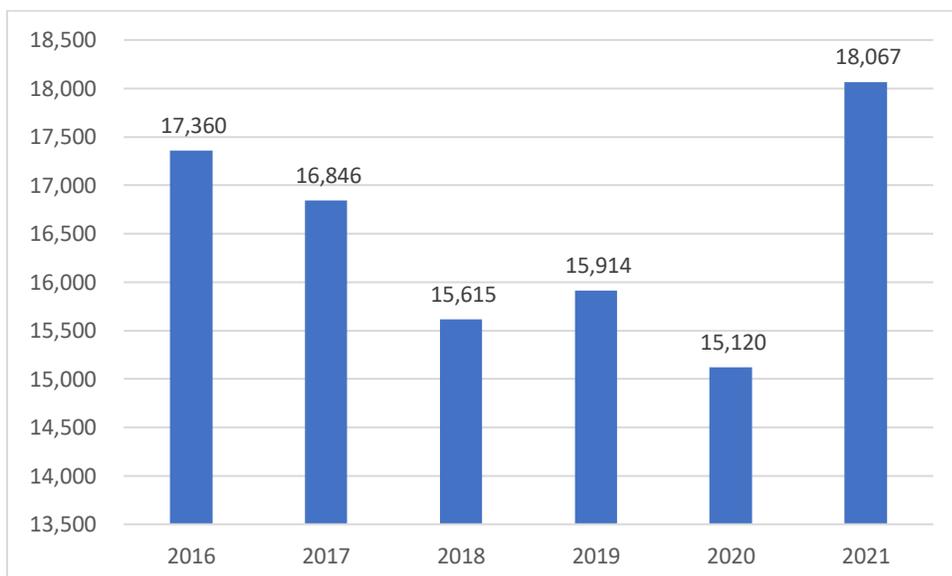
C.1.3. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, entah itu sandang, pangan, maupun papan. Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan dapat dilihat dari aspek-aspek lainnya, seperti sosial dan budaya. Apabila kemiskinan tidak mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini bisa menyebabkan lingkaran kemiskinan yang akan terus berlanjut ke generasi setelahnya

1) Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2022

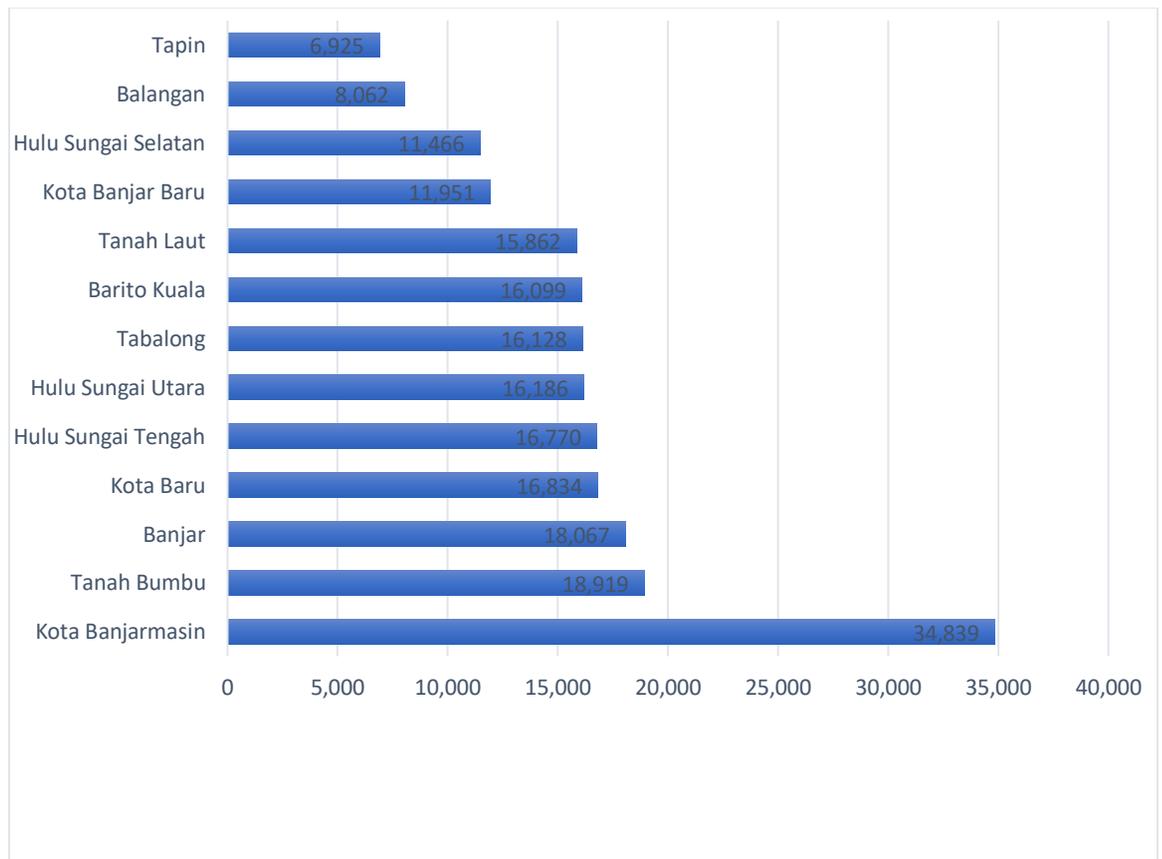


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar dapat dikatakan fluktuatif. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar adalah sebanyak 17.360 orang dan menjadi angka paling tinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar turun pada angka 16.850 orang. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar mengalami penurunan pada angka 15.610 orang. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar adalah sebanyak 15.910 orang dan mengalami kenaikan. Tahun 2020 angka tersebut menurun di angka 15.120 orang. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 18.067 orang. Hal ini disebabkan antara lain karena dampak pandemi covid 19, peningkatan pengangguran, banjir, menurunnya nilai tukar petani.

Namun apabila dibandingkan jumlah penduduk miskin antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2021, maka jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Banjar berada di posisi ketiga terbanyak yaitu sebesar 18.067 jiwa. Untuk penduduk yang hidup berada di bawah garis kemiskinan terbanyak ada di Kota Banjarmasin sebanyak 34.839 jiwa, Tanah Bumbu sebanyak 18.919 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Tapin sebanyak 6.925 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang)
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

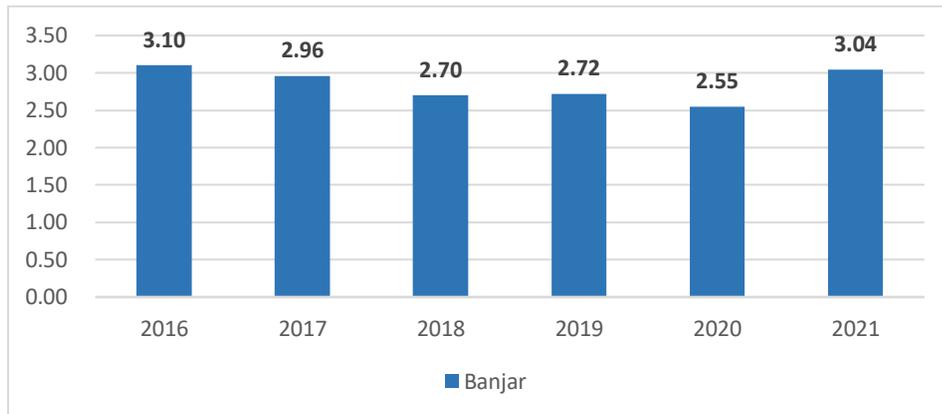


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

2) Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Gambar Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2016-2022

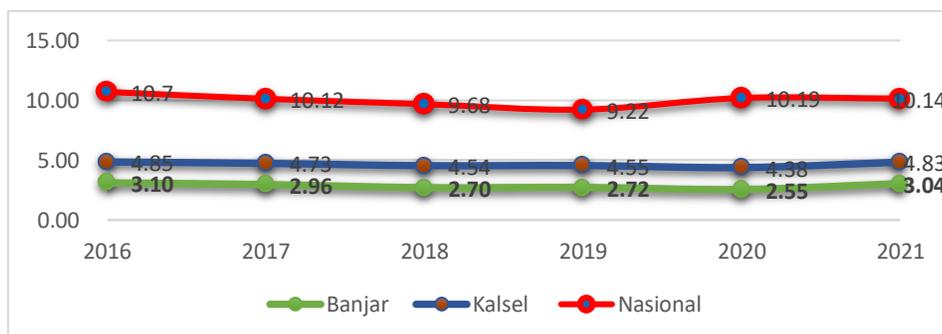


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2023

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjar selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 - 2020 menunjukkan tren yang baik (menurun), meskipun pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebesar 0,02 poin menjadi 2,72 %. Namun di tahun 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 0,17 poin menjadi 2,55% akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,49 poin menjadi 3,04 %. Angka kemiskinan semakin membaik begitu memasuki semester ke-II tahun 2022 dan berlanjut hingga semester I tahun 2023.

Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar lebih rendah. Di Tahun 2021, persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar pada posisi 3,04% sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,38%. Sementara untuk perkembangan persentase penduduk miskin secara umum di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi dari di tahun 2021.

Gambar Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016-2022

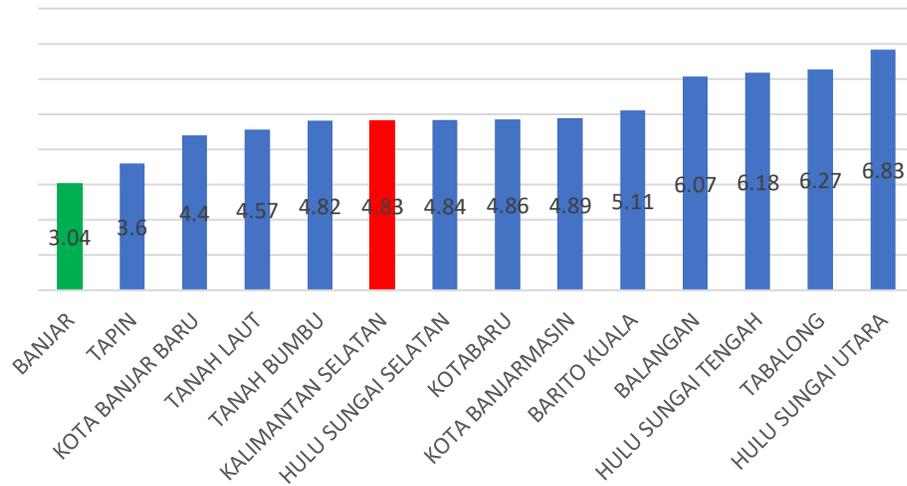


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS RI, 2023

Apabila dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar berada di posisi pertama

yang paling rendah, diikuti Kabupaten Tapin dengan persentase kemiskinan sebesar 3,06. Sementara Persentase penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 6,83 persen.

Gambar 2. 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

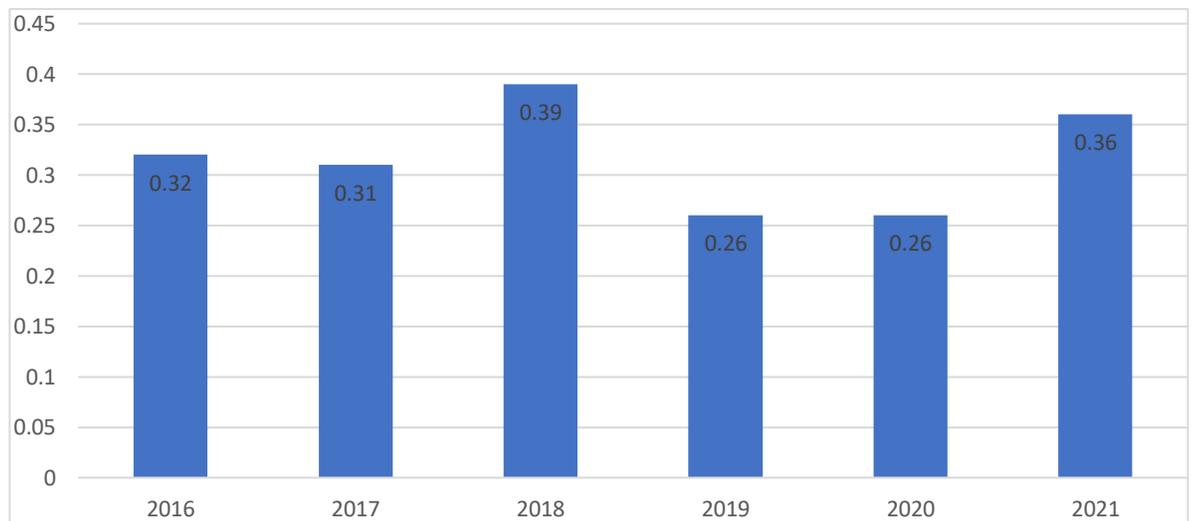


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2023

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dalam kurun 5 tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banjar menurun dari awalnya 0,32 pada tahun 2016, menjadi 0,31 pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu pada angka 0,39. Tahun 2019 mengalami penurunan pada angka 0,26 dan tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banjar sama pada tahun sebelumnya yaitu 0,26 serta pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,36. Hal ini terus mengalami perbaikan begitu memasuki tahun 2022 dan tahun 2023.

Gambar Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2022

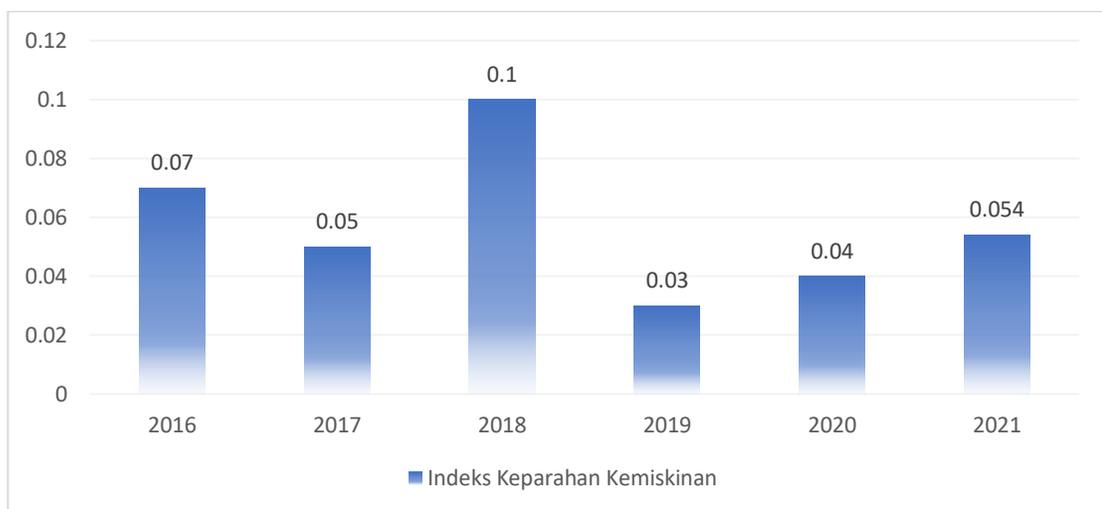


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2023

4) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun tahun 2016-2020 terdapat dalam tabel dibawah ini. Pada tahun 2016 dengan nilai indeks 0,7 menjadi 0,05 pada tahun 2017. Tahun 2018 nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar mengalami kenaikan pada angka 0,1. Tahun 2019 mengalami penurunan di angka 0,03 dan tahun 2020 mengalami kenaikan pada angka 0,04. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,05. Hal ini terus mengalami perbaikan begitu memasuki tahun 2022 dan tahun 2023.

Gambar 2. 3. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2022

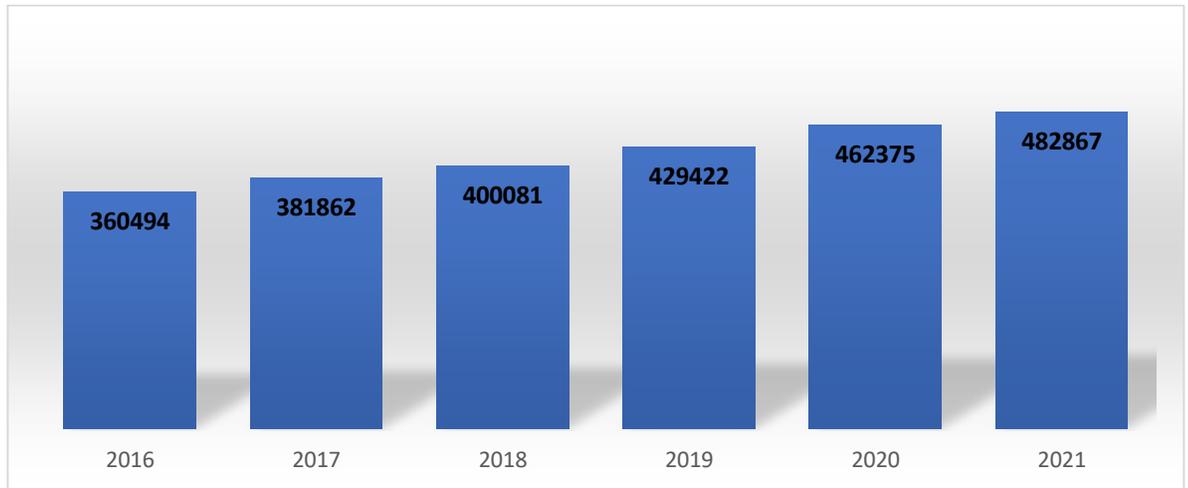


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2023

5) Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan. Yang pada tahun 2016 sebesar 360.494 Rp/kapita/bulan menjadi 381.862 Rp/kapita/bulan pada tahun 2017. Tahun 2018 garis kemiskinan naik menjadi 400.081Rp/kapita/bulan. Tahun 2019 juga mengalami kenaikan pada angka 429.422 Rp/kapita/bulan. Tahun 2020 juga mengalami kenaikan di angka 462.375 Rp/kapita/bulan dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 482.867 Rp/kapita/bulan. Hal ini terus mengalami perbaikan begitu memasuki tahun 2022 dan tahun 2023, artinya terjadi peningkatan pengeluaran dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin Kabupaten Banjar.

Gambar 2. 4. Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2022



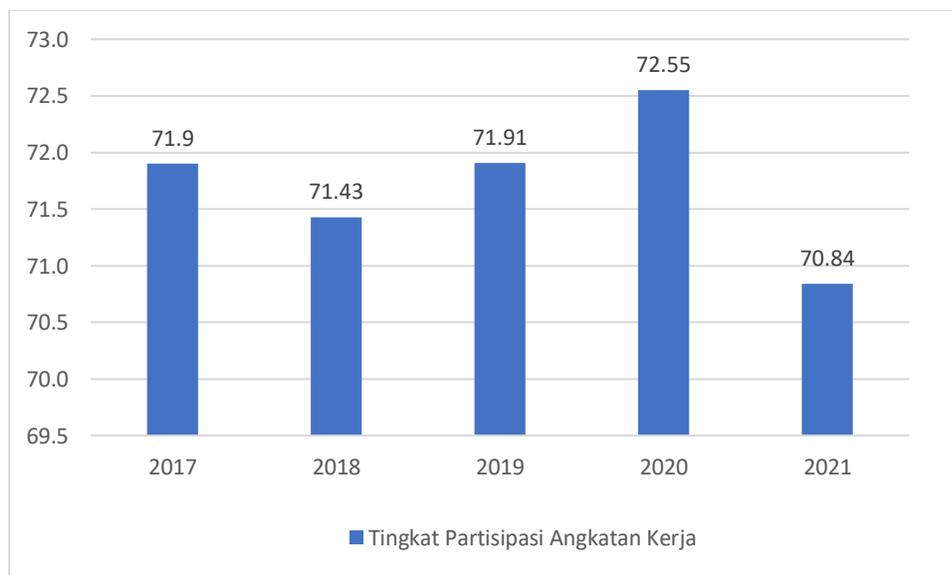
Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2023

C.1.4. Ketenagakerjaan

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Dilihat dari sisi usia, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka banyak yang masih menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. TPAK yang rendah juga akan ditemui pada kelompok penduduk usia kerja wanita. Keadaan ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, namun dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut, Partisipasi Angkatan Kerja juga akan mulai berubah sehingga angka TPAK ini juga cenderung untuk meningkat. Perkembangan capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banjar pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2022



Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka 2023

Dalam 5 tahun terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Banjar fluktuatif. Pada tahun 2017 TPAK Kabupaten Banjar 71,90%, TPAK tahun 2018 adalah sebesar 71,43% dan meningkat pada tahun 2019 pada angka 71,91 dan tahun 2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 70,84%. Hal ini terus mengalami perbaikan begitu memasuki tahun 2022 dan tahun 2023.

Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perlu diantisipasi di tahun 2023 karena, dilihat dari sisi tingkat kemudahan atau kesulitan untuk mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator yang cukup penting dalam masalah ketenagakerjaan yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran secara konseptual didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur dengan total penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja. Perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjar pada tahun 2015-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2022



Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka 2023

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banjar fluktuatif. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Banjar adalah 3,11% dan pada tahun 2018 dan 2019 turun menjadi 2,90% dan 2,89%. Tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu masing - masing pada angka 3,87 dan 3,98. Kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 disebabkan pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sampai dengan 2021 dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup besar sebagai konsekuensi pembatasan kegiatan masyarakat pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun hal ini terkoreksi begitu memasuki tahun 2022 yang merupakan

awal dari perubahan keadaan setelah masa pandemi Covid yang terjadi di tahun 2020-2021.

Masih perlu adanya intervensi kebijakan untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Banjar. Disisi lain, juga hal ini perlu diantisipasi karena lapangan kerja semakin terbatas namun kebutuhan akan pekerjaan terus meningkat.

C.2. Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Banjar Tahun 2023 Dan 2024 Dari Sisi Pengeluaran

PDRB Kabupaten Banjar berdasarkan sisi pengeluaran tahun 2023, ditetapkan akan mengalami pertumbuhan antara 4,29 – 5,73%, sasaran PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2023, disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Sasaran PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2023 Berdasarkan Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2023 LOW	2023 MED	2023 HIGH
Konsumsi Rumah Tangga	4,54	4,87	5,46
Konsumsi LNPRT	3,36	3,97	4,57
Konsumsi Pemerintah	4,15	5,22	7,18
Investasi/PMTB	5,92	7,42	7,98
Ekspor Barang dan Jasa	0,07	4,72	2,81
Impor Barang dan Jasa	13,00	13,70	14,39
PDRB	4,29	5,01	5,73

Dalam rangka pencapaian sasaran PDRB tahun 2023, maka ada beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu adanya kenaikan yang ekstrim terhadap investasi tahun 2022 sebesar lebih 200% dibanding tahun 2021 menyebabkan terjadi penurunan investasi yang sangat besar ditahun 2023 karena adanya anova anomali kenaikan investasi tersebut. Informasi belum merata kepada masyarakat terkait perizinan berusaha berbasis elektronik / OSS RBA (eksternal) - kurang dukungan lintas sektor.

Tabel 3.8. Sasaran PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2024 LOW	2024 MED	2024 HIGH
Konsumsi Rumah Tangga	2,41	2,97	3,53
Konsumsi LNPRT	3,36	3,94	4,52
Konsumsi Pemerintah	3,71	5,57	7,44
Investasi/PMTB	11,36	11,88	12,40
Ekspor Barang dan Jasa	4,98	6,29	7,60
Impor Barang dan Jasa	6,48	7,09	7,70
PDRB	4,92	5,60	6,28

Untuk sasaran tahun 2024, PDRB diperkirakan akan mengalami pertumbuhan di kisaran 4,92 – 6,28 % dengan dasar pertimbangan

adanya beberapa faktor pendorong seperti Investasi atau Pembentukan Modal tetap bruto akan tumbuh positif sekitar 11,36 – 12,40 persen ini dipengaruhi oleh transisi dari pandemi menjadi endemik, diperkirakan akan terjadi pergeseran dari pertumbuhan yang didorong ekspor menjadi pertumbuhan yang didorong oleh sektor swasta dan domestik, Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. **Di RKPD 2024 proyeksi tren pertumbuhan akan dipertahankan tetap positif dengan menganggarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga pasokan kebutuhan pokok untuk stabilitas inflasi.**

Dalam rangka pencapaian sasaran PDRB tahun 2024, maka ada beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu Daya beli masyarakat berpotensi tertahan di tengah potensi peningkatan harga barang dan jasa, melambatnya kinerja konsumsi RT dan LU Tambang pada 2023 diperkirakan berdampak pada menurunnya impor barang konsumsi & modal serta bahan baku industri untuk mendorong LU Utama, dan adanya berbagai tantangan dalam proses membuka usaha di Kalsel dipermudah sehingga memancing investor masuk ke industri transformasi tersebut.

Tantangan lainnya adalah seperti kenaikan suku bunga yang terjadi di tahun 2023 dan inflasi global karena kenaikan harga energi, akan berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga di tahun 2024 dan adanya pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor yang akan dapat mempengaruhi nilai PDRB berdasarkan sub sektor Ekspor Barang dan Jasa.

C.3. Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Banjar Tahun 2023 Dan 2024 Dari Sisi Lapangan Usaha

PDRB Kabupaten Banjar berdasarkan lapangan usaha tahun 2023, ditetapkan akan mengalami pertumbuhan antara 4,29 – 5,73%. Sasaran PDRB Kabupaten Banjar berdasarkan lapangan usaha Tahun 2023, disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9. Sasaran PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2023 Berdasarkan Sisi Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	2023 LOW	2023 MED	2023 HIGH
Pertanian	0,25	0,54	0,83
Pertambangan	0,04	2,45	3,98
Industri	0,54	0,61	0,69
Listrik dan Gas	5,54	6,02	6,51
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,59	6,05	6,52
Konstruksi	2,10	2,35	2,60
Perdagangan	13,85	14,14	14,18
Transportasi dan Pergudangan	1,19	1,33	1,46
Akomodasi MaMin	9,15	10,08	14,72
Infokom	2,81	3,15	3,23
Jasa Keuangan	5,07	5,42	5,77
Real Estat	0,12	0,13	0,99
Jasa Perusahaan	8,13	8,82	9,52
Adm. Pemerintahan,	12,78	12,98	13,17
Jasa Pendidikan	8,85	9,53	11,01
Jasa Kesehatan	4,85	5,58	6,01
Jasa lainnya	4,82	6,02	8,21
PDRB	4,29	5,01	5,73

Dalam rangka pencapaian sasaran PDRB tahun 2023, maka ada beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu pemulihan ekonomi global yang tidak merata, Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah dan cenderung turun serta harga produk pertanian sangat fluktuatif dan tidak pasti, serta perekonomian kabupaten banjar masih bertumpu pada sektor pertambangan, belum terjadi transformasi struktur yang nyata ke sektor non pertambangan. Adanya tantangan lain yang akan dihadapi di sektor industri dan perdagangan seperti :

- Penyesuaian selera pasar yang beragam
- Perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk
- Belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk ikm dan pelaku usaha belum optimal;

Pemerintah kabupaten Banjar telah menselaraskan kegiatan dalam pencapaian sasaran PDRB tahun 2023 dengan arah kebijakan pemerintah , seperti :

- Penguatan logistik nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok melalui integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri
- Pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan, serta
- Peningkatan persaingan usaha dan perlindungan konsumen melalui penguatan iklim persaingan usaha yang sehat dan redesain program perlindungan konsumen yang lebih bersifat multi channel
- Perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik;
- Pengembangan pola perjalanan yang mudah diakses;

- Penguatan rantai pasok dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Peningkatan diversifikasi atraksi di 5 destinasi super prioritas dengan dukungan investasi pariwisata, event dan mice;
- Penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk dan layanan;
- Percepatan digitalisasi usaha dan produk kreatif;
- Scaling-up start-up ekonomi kreatif dan digital;
- Upskilling dan reskilling sdm pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital;
- Penguatan ekspor gastronomi melalui “indonesia spice up the world”;
- Perluasan gerakan bangga buatan indonesia.

Untuk sasaran tahun 2024, PDRB Kabupaten Banjar dengan angka pertumbuhan di kisaran 4,92 – 6,28 % disusun dengan dasar pertimbangan beberapa faktor seperti :

- Keberlanjutan melalui petani-petani milenial dan sinergitas antar pihak dapat mendorong sektor ekonomi tumbuh secara positif
- Produksi batubara diperkirakan masih memingkat dan menjadi 3 besar sektor yang menunjang PDRB Kabupaten Banjar
- Keberlanjutan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi faktor pendorong industri pengolahan Kabupaten Banjar tumbuh positif
- Imbas adanya inflasi global akan menyebabkan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi akan mengalami perlambatan (tumbuh di bawah 1%).
- Adanya kenaikan suku bunga yang akan terjadi di tahun 2023, yang akan menurunkan iklim investasi hingga ke tahun 2024.

Tabel3.10. Sasaran PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Sisi Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	2024 LOW	2024 MED	2024 HIGH
Pertanian,	1,79	2,07	2,36
Pertambangan	7,49	8,98	10,47
Industri	14,04	14,11	14,18
Listrik dan Gas	5,45	5,90	6,36
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,39	6,83	7,26
Konstruksi	5,39	5,64	5,89
Perdagangan	7,94	7,98	8,02
Transportasi dan Pergudangan	0,98	1,12	1,25
Akomodasi MaMin	0,62	4,83	9,05
Infokom	0,06	0,14	0,22
Jasa Keuangan	5,84	6,17	6,51
Real Estat	0,45	1,30	2,16
Jasa Perusahaan	9,32	9,96	10,59
Adm. Pemerintahan,	0,13	0,30	0,47
Jasa Pendidikan	5,72	7,07	8,41

Jasa Kesehatan	2,11	2,51	2,92
Jasa lainnya	3,10	5,16	7,23
PDRB	4,92	5,60	6,28

Langkah-langkah pencapaian sasaran PDRB Kabupaten Banjar 2024 selanjutnya akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah berupa hilirisasi industri melalui peningkatan kesadaran perusahaan-perusahaan industri dalam melaporkan data industrinya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan, Meningkatkan kreatifitas dan inovasi IKM dalam pengembangan produk, Meningkatkan pengetahuan IKM dalam menguasai teknologi digital/via online, Meningkatkan penguatan kapasitas manajerial usaha mikro dan industri, Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ikm untuk melegalkan usaha, Meningkatkan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran antar daerah dan pengembangan ekspor, Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan Melaksanakan reviu RPIK (rencana pembangunan industri kabupaten) serta Mengembangkan sentra industri.

C.4. Keselarasan LPE Nasional, Propinsi Kalsel Dan Kabupaten Banjar Berdasarkan Sisi Pengeluaran

Jika diperbandingkan antara Sasaran PDRB Nasional, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar, maka akan terlihat bahwa sasaran PDRB Kabupaten Banjar tahun 2024 masih berada dalam interval sasaran PDRB Nasional dan propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan sisi pengeluaran. Hal ini karena adanya beberapa faktor pendorong dalam pencapaian sasaran PDRB tahun 2024 kabupaten Banjar seperti impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 4,72 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat karena didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi produk lokal. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif mencapai 4,47 – 5,27 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan ENDEMI COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi

Tabel 3.11. Keselarasan Sasaran PDRB Nasional, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	Nasional	Propinsi Kalsel	Kab. Banjar
Konsumsi Rumah Tangga	5,4 - 5,6	1,53 – 2,13	2,41 - 3,53
Konsumsi LNPRT	5,4 - 5,6	0,93 – 1,53	3,36 - 4,52
Konsumsi Pemerintah	4,7 - 4,9	2,03 – 2,63	3,71 - 7,44
Investasi/PMTB	6,6 - 7,0	3,07 – 3,67	11,36 - 12,40
Ekspor Barang dan Jasa	4,7 - 4,9	14,14 – 14,74	4,98 - 7,60
Impor Barang dan Jasa	4,7 - 4,8	14,34 – 14,94	6,48 - 7,70
PDRB	5,7 - 6,0	4,67 – 5,27	4,92 - 6,28

C.5. Keselarasan LPE Nasional, Propinsi Kalsel Dan Kabupaten Banjar Berdasarkan Sisi Lapangan Usaha

Jika diperbandingkan antara Sasaran PDRB Nasional, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar, maka akan terlihat bahwa sasaran PDRB Kabupaten Banjar tahun 2024 masih berada dalam interval sasaran PDRB Nasional dan propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan sisi lapangan usaha . Hal ini karena adanya beberapa faktor pendorong dalam pencapaian sasaran PDRB tahun 2024 kabupaten Banjar seperti :

- Produksi pertanian diperkirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan program peningkatan kualitas baik dari hasil produksi maupun SDM para petani
- Subsektor industri diperkirakan dapat mengalami pemulihan secara bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 1,23–1,42 persen
- Pemulihan industri makanan dan minuman seiring dengan pemulihan mobilitas dan daya beli masyarakat;
- Pemulihan daya beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (durable);
- Dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri;
- Peningkatan utilisasi produksi;
- Peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi;

Tabel 3.11. Keselarasan Sasaran PDRB Nasional, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Sisi Lapangan Usaha

Komponen Pengeluaran	Nasional	Propinsi Kalsel	Kab. Banjar
Pertanian,	3,8 - 3,9	1,04 – 1,64	1,79 - 2,36
Pertambangan	1,9 – 2,0	4,47 – 5,07	7,49 - 10,47
Industri	6,2 – 6,5	4,93 – 5,53	14,04 - 14,18
Listrik dan Gas		6,43 – 7,03	5,45 - 6,36
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang		4,26 – 4,86	6,39 - 7,26
Konstruksi	6,1 – 6,4	3,94 – 4,54	5,39 - 5,89
Perdagangan	6,0 – 6,3	7,33 – 7,93	7,94 - 8,02
Transportasi dan Pergudangan		9,58 – 10,18	0,98 - 1,25
Akomodasi dan Makan Minuman		9,13 – 9,73	0,62 - 9,05
Infokom	8,3 – 8,9	6,49 – 7,09	0,06 - 0,22
Jasa Keuangan		2,05 – 2,65	5,84 - 6,51
Real Estat		5,46 – 6,06	0,45 - 2,16
Jasa Perusahaan		6,55 – 7,15	9,32 - 10,59
Adm. Pemerintahan,		2,05 – 2,65	0,13 - 0,47
Jasa Pendidikan		6,55 – 7,15	5,72 - 8,41
Jasa Kesehatan		4,39 – 4,83	2,11 - 2,92
Jasa lainnya		3,36 – 4,51	3,10 - 7,23
PDRB	5,7 - 6,0	4,67 – 5,27	4,92 - 6,28

C.6. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Banjar

C.6.1. Analisis Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten Banjar dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat, Penerapan aplikasi retribusi online bagi seluruh SKPD Pemungut, Pengembangan dengan penambahan alat rekam data transaksi untuk hotel dan resto, mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD, meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pengelolaan daerah akan tetap memperhatikan prioritas belanja daerah berupa :

- (1) Program prioritas RPJMD, Project Strategis Prioritas, Kebijakan Pemerintah Pusat, SPM, Proporsi Belanja Wajib
- (2) Belanja Tusi Perangkat Daerah

(3) Belanja operasi untuk Hibah dan Bansos, dan sebagainya

Adapun perkembangan pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Banjar periode tahun 2016-2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12. Perkembangan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016-2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	1.881.870.047.704,00	1.670.322.354.716,00	88,75
2017	1.791.906.459.522,00	1.642.767.202.851,00	91,67
2018	1.779.577.260.420,00	1.647.849.074.724,00	92,59
2019	2.067.657.506.963,00	1.912.511.888.376,00	92,49
2020	1.922.023.671.498,00	1.802.710.482.043,00	93,79
2021	1.863.442.573.854,00	1.698.527.070.874,00	91,15
2022	2.039.932.163.848,00	1.872.082.074.039,57	91,77

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka ditentukanlah arah dan kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan *mandatory spending* (pengeluaran yang sudah diatur undang-undang) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pengawasan, Alokasi Dana Desa, Paskribaraka, Belanja Pegawai Tidak Lebih 30 % Dari Belanja Daerah (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 146)
- (2) Melaksanakan kebijakan Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan anggaran untuk mendanai Projek Strategis Daerah dan Kolaborasi sumber Pendanaan Lainnya dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah
- (3) Melaksanakan kebijakan pengeluliran/belanja daerah pada setiap kegiatan yang disertai tolak ukur dan target secara jelas dan terukur dan terperinci beserta lokasi pembangunan yang dilakukan.
- (4) Melaksanakan kebijakan bahwa setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan
- (5) Melakukan penyediaan alokasi belanja untuk pilkada tahun 2024.

Dengan adanya arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, berikut ini adalah realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan target pendapatan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13. Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah /Berkurang	%
		2023	2024		
4	PENDAPATAN DAERAH	250,300,000,000.00	260,300,000,000.00	10,000,000,000.00	4.00%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95,037,929,649.00	100,037,929,649.00	5,000,000,000.00	5.26%
4.1.01	Pajak Daerah	8,385,320,000.00	9,385,320,000.00	1,000,000,000.00	11.93%

4.1.02 Retribusi Daerah	22,498,156,214.00	22,498,156,214.00	0.00	0.00%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	124,378,594,137.00	128,378,594,137.00	4,000,000,000.00	3.22%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	1,907,783,203,428.00	1,907,783,203,428.00	0.00	0.00%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER	1,784,552,925,590.00	1,784,552,925,590.00	0.00	0.00%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	123,230,277,838.00	123,230,277,838.00	0.00	0.00%
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah	3,036,000,000.00	3,036,000,000.00	0.00	0.00%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,036,000,000.00	3,036,000,000.00	0.00	0.00%
4.3.01 Pendapatan Hibah	2,161,119,203,428.00	2,171,119,203,428.00	10,000,000,000.00	0.46%
Jumlah Pendapatan	250,300,000,000.00	260,300,000,000.00	10,000,000,000.00	4.00%

Dari tabel diatas diketahui pendapatan daerah yang ditargetkan pada RKPD mengalami kenaikan Rp 10,000,000 dibanding dengan realisasi PAD tahun 2023 . Kenaikan target tahun 2024 dibanding realisasi di tahun 2023 ini terjadi karena adanya faktor pendorong di tahun 2024 seperti adanya Investasi atau Pembentukan Modal tetap bruto yang akan tetap tumbuh positif sekitar karena transisi dari pandemi menjadi endemik, dan menguatnya tren investasi hijau yang sudah semakin menguat sejak tahun 2023. Sedangkan pada kelompok pendapatan dana transfer yang direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1,907,783,203,428 diproyeksikan tetap untuk target pendapatan daerah tahun 2024.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang Sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru. Apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menggiatkan pada upaya mencari sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar.

Selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah. **Sisi pengeluaran maupun produksi akan terus dipertahankan dan dijadikan hal berkelanjutan melalui kegiatan KEMD Daerah yang telah dilakukan provinsi dengan mengikutsertakan seluruh kab/kota dengan pendampingan Bappenas.**

Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, diarahkan pada:

1. Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat (retribusi parkir, terminal, galian C dan lain-lain) serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ketiga;
2. Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
5. Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.
6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan

kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

C.6.2. Analisis Kebijakan Belanja Kabupaten Banjar 2024

Kebijakan pembiayaan kabupaten Kabupaten Banjar untuk tahun 2024 akan diarahkan untuk dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan, pelaksanaan pemberian pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan dalam rangka penyaluran kredit dengan bunga nol persen serta adanya pengalokasian penyertaan modal Daerah.

Realisasi belanja pada tahun 2023 dan target tahun 2024 dihitung dari jumlah belanja operasi, belanja transfer dan pembiayaan. Berikut disajikan tabel perhitungan kebutuhan belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan Target Belanja Tahun 2024

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah /Berkurang	%
		2023	2024		
5	BELANJA	2.249.762.820.652,00	2.287.819.203.428,00	38.056.382.776,00	1,66%
5.1	BELANJA OPERASI	1.772.715.598.337,00	1.791.743.789.725,00	19.028.191.388,00	1,06%
5.1.01	Belanja Pegawai	920.429.859.575,00	920.429.859.575,00	0,00	0,00%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.641.802.218,00	807.669.993.606,00	19.028.191.388,00	2,36%
5.1.05	Belanja Hibah	58.505.641.544,00	58.505.641.544,00	0,00	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.138.295.000,00	5.138.295.000,00	0,00	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	326.416.034.167,00	345.444.225.555,00	19.028.191.388,00	5,51%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.565.003.412,00	5.565.003.412,00	0,00	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.030.097.858,00	75.372.828.320,00	6.342.730.462,00	8,42%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.577.560.362,00	80.920.290.824,00	6.342.730.462,00	7,84%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.200.419.435,00	182.543.149.899,00	6.342.730.464,00	3,47%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.042.953.100,00	1.042.953.100,00	0,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	142.631.188.148,00	142.631.188.148,00	0,00	0,00%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00	8.916.525.800,00	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	133.714.662.348,00	133.714.662.348,00	0,00	0,00%
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(88.643.617.224,00)	(116.700.000.000,00)	(28.056.382.776,00)	(24,04%)

Hibah yang terus menerus setiap tahun pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 58.505.641.544. Hibah ini diperuntukkan untuk membantu persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Selain itu juga digunakan untuk Belanja Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk lembaga pendidikan non pemerintah, hibah untuk organisasi-organisasi yang rutin diberikan setiap tahun dan hibah untuk partai politik.

Bantuan sosial diproyeksikan sebesar Rp 5.138.295.000. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam membuat jaring pengaman sosial. Anggaran ini diperhitungkan dari alokasi pendapatan pajak daerah dan retribusi sebesar kurang lebih 10%. Bantuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp. 133.714.662.348,00. Anggaran ini bersumber dari alokasi dana desa dari APBD dan bantuan keuangan untuk Pilkades, belum memperhitungkan Dana Desa dari Pemerintah Pusat. . Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp 8.000.000.000. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak terencana.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar telah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian serta transmigrasi.
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
6. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap

indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.

7. Optimalisasi Belanja Langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif
8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.
9. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
10. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri
11. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan
12. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran berikutnya juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

C.6.3. Analisis Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Banjar 2024

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (c) Penerimaan Pinjaman Daerah; (d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; (e) Penerimaan Piutang Daerah, dan (f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan, digunakan untuk (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; (c) Pembayaran Pokok Utang; dan (d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis tentang Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 dan proyeksi tahun 2024.

Tabel 3.14. Proyeksi Pembiayaan Kab. Banjar tahun 2024

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah /Berkurang	%
		2023	2024		
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.943.617.224,00	140.000.000.000,00	28.056.382.776,00	20,04%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.943.617.224,00	140.000.000.000,00	28.056.382.776,00	20,04%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	111.943.617.224,00	140.000.000.000,00	28.056.382.776,00	20,04%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.300.000.000,00	23.300.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.300.000.000,00	23.300.000.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.300.000.000,00	23.300.000.000,00	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	88.643.617.224,00	116.700.000.000,00	28.056.382.776,00	24,04%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00%

Pada tahun 2023 diperkirakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA sebesar 140 Milyar lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar Rp 28.056.382.776, hal ini berdasarkan tahun 2021 penerimaan pembiayaan dari SiLPA tidak terlalu besar yakni Rp **111.943.617.224,**. Pada pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap sebesar Rp **23.300.000.000.** Digunakan untuk menyertakan modal ke PT AM Intan Banjar dan Bank Kalsel seta pemberian pinjaman daerah kepada BPR dalam rangka melaksanakan Program Kurma Manis berupa pinjaman dengan bunga nol persen kepada masyarakat.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah terdiri dari serangkaian program yang terkait secara khusus dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah, urgensi dan potensi peningkatan kinerja pembangunan. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan dengan cara mengevaluasi masalah yang dihadapi dalam pembangunan daerah dan menyesuaikan dengan program pembangunan yang telah diatur dalam rancangan RPJMD untuk tahun tertentu.

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang menjadi titik tolak untuk mencapai target lima tahun dalam RPJMD. Program unggulan SKPD dengan tingkat realisasi yang tinggi dan dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahunan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah juga dapat dilihat sebagai operasional dari tujuan strategis daerah yang didasarkan pada urgensi dan potensi peningkatan kesejahteraan serta cakupan pembangunan.

Program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh SKPD dan terkait langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian prioritas pembangunan daerah, serta terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan minimal layanan. Keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi masalah yang dihadapi menjadi faktor penentu dalam menentukan program prioritas mana yang dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, tidak semua program prioritas dapat dijadikan prioritas pembangunan daerah.

Proses perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan atas telaahan berbagai analisis yang meliputi: 1) Hasil evaluasi capaian pembangunan, 2) Identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, dan 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjar diarahkan untuk lebih komprehensif dalam menentukan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah.

Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2024 disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan Nasional guna menjamin keselarasan dan konsistensi pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam merencanakan pembangunan 2024 harus memperhatikan serta berpedoman pada Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar tahun 2021-2041, dimana dalam peraturan daerah tersebut diamanatkan bahwa Penataan ruang daerah ditujukan untuk mendukung keunggulan ekonomi Wilayah melalui pengelolaan sumberdaya alam guna mendukung Daerah sebagai pusat pertumbuhan Provinsi berdasarkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

- a. Pemerataan usaha pembangunan di seluruh kecamatan;
- b. Pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;
- d. Perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- e. Pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan;
- f. Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian;
- g. Pengembangan Kawasan Perikanan budidaya dan tangkap;
- h. Perlindungan dan konservasi Kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove;

- i. Pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal; dan
- j. Pembukaan permukiman perdesaan baru.

Selain itu RPJPD juga harus dijadikan landasan, dimana rencana pembangunan tahun 2024 ini merupakan bagian dari penjabaran perencanaan tahapan lima tahun dari RPJPD Tahun 2005-2025.

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan guna keberlanjutan rencana pembangunan daerah Kabupaten Banjar serta mewujudkan visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri dan Agamis”. Mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Banjar yang terdiri dari:

- Misi 1 Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas sumber daya manusia.
- Misi 2 Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
- Misi 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
- Misi 4 Penyelenggaraan ke Pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif
- Misi 5 Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan ke Pemerintahan luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Berdasarkan kelima misi tersebut dapat dijabarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Hubungan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Sasaran 1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan	Strategi 1.1 Menedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat
	Sasaran 1.2 Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	Strategi 1.2 Meningkatkan <i>hard skill & soft skill</i> berlandaskan etika budaya & agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil & produktif
	Sasaran 1.3 Meningkatnya daya beli masyarakat	Strategi 1.3a Melakukan upaya untuk menstabilkan harga & akses masyarakat miskin & berdaya beli rendah terhadap barang2 kebutuhan pokok Strategi 1.3b Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
	Sasaran 1.4 Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Strategi 1.4 Melakukan upaya diversifikasi keanekaragaman pangan serta upaya ketahanan pangan dan gizi masyarakat secara terpadu
	Sasaran 1.5 Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Strategi 1.5 Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/ advokasi dan pemberdayaan terhadap perempuan & anak
Misi 2: Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan		
Tujuan 2.1: Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif & berkualitas	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Strategi 2.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pembangunan sektor unggulan
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	Strategi 2.1.2a Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian masyarakat, mekanisasi pertanian
		Strategi 2.1.2b Ekstensifikasi pertanian melalui revitalisasi dan rehabilitasi lahan tidur dan lahan pertanian yang rusak menjadi lahan pertanian yang produktif.
		Strategi 2.1.2c Meningkatkan produktivitas hasil perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung, sarana dan prasarana, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kemampuan nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan serta pemasar hasil perikanan
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	Strategi 2.1.3a Meningkatkan daya saing industri besar, menengah & kecil serta industri kreatif, serta meningkatkan fasilitas sarana & prasarana pelayanan untuk menunjang perkembangan Industri. Hulunilasaki dan hilirisasi sektor industri yang terintegrasi dengan baik
		Strategi 2.1.3b Peningkatan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif
		Strategi 2.1.3c

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengembangan infrastruktur digital dan program-program inovasi digital sektor perekonomian dan usaha produktif masyarakat dengan mengutamakan produk unggulan Kabupaten Banjar
Tujuan 2.2 Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran	Sasaran 2.2.1 Menurunnya Angka Pengangguran	Strategi 2.2.1a Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui <i>link & match</i> antara kebutuhan <i>suply & demand</i> tenaga kerja, terutama tenaga kerja penganggur
		Strategi 2.2.1b Mempercepat tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan, sektor ekonomi kreatif, dan sektor ekonomi unggulan
	Sasaran 2.2.2 Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Strategi 2.2.2a Meningkatkan upaya pemulihan & pengembangan Koperasi Sehat & UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing & terserap pasar melalui kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, swasta, media & akademisi
	Sasaran 2.2.3 Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Strategi 2.2.3 Upaya pengembangan hasil pertanian & perikanan yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani/ Nelayan & Masyarakat Pengguna hasil pertanian/perikanan
	Sasaran 2.2.4 Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Strategi 2.2.4a Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS
		Strategi 2.2.4b Reformasi sistem penyaluran bantuan sosial sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM
	Sasaran 2.2.5 Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan	Strategi 2.2.5 Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa untuk melakukan inovasi, partisipatif inklusif, transparan serta akuntabel.
Sasaran 2.2.6 Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Strategi 2.2.6 Upaya peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera khususnya melalui usaha mandiri ibu rumah tangga	
	Sasaran 2.2.7 Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Strategi 2.2.7 Upaya membangun infrastruktur fisik dan non fisik termasuk komunikasi dan informasi melalui IT dll untuk pembangunan yang berkeadilan antar wilayah dan masyarakat.
Misi 3: Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		
Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan	Sasaran 3.1 Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan	Strategi 3.1 Upaya mensinkronkan rencana tata ruang dengan realisasi pembangunan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
yang berkelanjutan	seluruh sektor pembangunan daerah	
	Sasaran 3.2 Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Strategi 3.2 Upaya penataan permukiman padat guna mewujudkan permukiman yang nyaman dan layak huni
	Sasaran 3.3 Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan	Strategi 3.3 Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar siap, tangguh dan sadar akibat bencana alam
	Sasaran 3.4 Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup	Strategi 3.4 Upaya penataan sarana & prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja
Misi 4: Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif		
Tujuan 4: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih & efektif	Sasaran 4.1 Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah	Strategi 4.1 Upaya ekstensi dan intensifikasi sumber PAD seperti penggalian potensi transaksi perdagangan dan ekonomi berbasis elektronik
	Sasaran 4.2 Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Strategi 4.2a Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat
		Strategi 4.2a Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
	Sasaran 4.3 Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Strategi 4.3a Upaya peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan sistem yang terintegrasi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pelaporan
		Strategi 4.3b Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh SKPD berdasar standar akuntansi pemerintah
		Strategi 4.3c Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	Sasaran 4.4 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Strategi 4.4 Upaya pengembangan kinerja sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yang akuntabel, bersih & berintegritas
Sasaran 4.5 Berkembangnya profesionalitas ASN	Strategi 4.5 Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit	
Sasaran 4.6 Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Strategi 4.6 Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana & prasarana IT yang memadai	

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Strategi 4.7 Percepatan dalam koordinasi dan kolaborasi pengembangan e-government yang terintegrasi
Misi 5: Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis		
Tujuan 5 Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur	Sasaran 5.1 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;	Strategi 5.1 Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dan agama dalam bidang pendidikan sejak usia dini
	Sasaran 5.2 Mengembangkan seni budaya Banjar & seni budaya religius yang mencerminkan karakter & kepribadian luhur masyarakat Banjar	Strategi 5.2 Upaya mendorong pengembangan kelompok budaya dan seni khas Banjar secara berkelanjutan secara nasional maupun internasional
	Sasaran 5.3 Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Strategi 5.3 Upaya fasilitasi peran pemuda dan santri yang berkinerja tinggi dalam seni budaya dan olah raga
	Sasaran 5.4 Meningkatkan ketertiban umum & ketenteraman di masyarakat	Strategi 5.4 Upaya pencegahan terjadi konflik ideologi dan SARA dimasyarakat melalui kolaborasi dengan sektor keamanan dan pertahanan lintas wilayah dan nasional
		Strategi 5.5 Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banjar

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun2024. Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya pada RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penetapan tujuan, sasaran dan target indikator pada RKPDP Tahun 2024. Hal ini secara rinci dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 4. 2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2024

Tujuan/Sasaran / Indikator	Target		
	2022	2023	2024
Tujuan 1 .1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,72	70,64	71,09
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,12	92,17	92,32
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan			
Indeks Kesehatan	73.43	73,76	74,15
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan			
Indeks Pendidikan	61.87	60,79	61,24
Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya daya beli masyarakat			
Indeks Daya beli	77.84	78,29	78,53

Tujuan/Sasaran / Indikator	Realisasi	Target	
	2022	2023	2024
Sasaran 1.1.4 : Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat			
Indeks Ketahanan Pangan	77.84	80,29	80,39
Sasaran 1.1.5 : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80.24	81,52	82,02
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61.52	67,43	69,24
Tujuan 2.1 : Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas			
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,46%	2,80%	3,53%
Pendapatan Per Kapita	Rp21.950.641	Rp21.177.000	Rp21.628.000
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi			
Indeks Konektivitas	66,00	72,70	75,46
Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan			
LPE sub sektor pertanian	0,23%	2,25%	2,50%
LPE sub sektor perikanan	3,05%	3,74%	3,88%
Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital			
LPE sektor industri Pengolahan	3,98%	2,02%	2,07%
Jumlah kunjungan wisatawan	2.105.450	4.250.000	4.500.000
Tujuan 2.2 : Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran			
- Persentase Penduduk miskin	2,79%	2,72%	2,70%
- Indeks Gini	0,3	0,312	0,311
Sasaran 2.2.1 : Menurunnya Angka Pengangguran			
Tingkat Pengangguran Terbuka	2.72	3,09	3,06
Sasaran 2.2.2 : Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM			
Persentase Koperasi Berkualitas	37.73%	39,64%	42,34%
Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	10.87	10,72%	13,69%
Sasaran 2.2.3 : Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan			
Nilai Tukar Petani (NTP)	105.88	104,36	104,90
Sasaran 2.2.4 : Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial			
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	14.92%	17%	20%
Sasaran 2.2.5 : Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan			
Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6793	0,6793	0,6907
Sasaran 2.2.6 : Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga			
Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	63%	82,14%	86,84%
Sasaran 2.2.7 : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah			
Indeks Infrastruktur	75.34	74,74	76,14
Tujuan 3.1 : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03	62,25	62,58
Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah			

Tujuan/Sasaran / Indikator	Realisasi	Target	
	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94.51	94,519	94,526
Sasaran 3.1.2 : Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni			
Persentase Kawasan Kumuh	9.33%	9,52%	9,36%
Sasaran 3.1.3 : Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan			
Indeks Risiko Bencana	151.6	150,6	149,6
Sasaran 3.1.4 : Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup			
Jumlah pelanggaran Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Tujuan 4.1 : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif			
Indeks Reformasi Birokrasi	56,97	65	70,5
Indeks Inovasi Daerah	52,53	50,05	54,20
Sasaran 4.1.1 : Terselenggaranya Reformasi sumber- sumber pendapatan daerah			
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	8.29	4%	4%
Sasaran 4.1.2 : Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik			
Indeks Kepuasan Masyarakat	84.97	85,00	86,00
Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja			
Nilai SAKIP	68.03	74,49	76,32
Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja			
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP
Sasaran 4.1.4 : Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel			
Indeks Perilaku Anti Korupsi	68.03	3,19	3,31
Sasaran 4.1.5 : Berkembangnya profesional ASN			
Indeks Profesionalitas ASN	40.26	61,50	65,50
Sasaran 4.1.6 : Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik			
Indeks SPBE	2.56	2,30	2,40
Tujuan 5.1 : Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur			
Rasio Kriminalitas	10,33	7,70	7,67
Persentase Forum Komunikasi Umat Beragama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;			
Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat	0	0	0
Sasaran 5.1.2 : Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar;			
Jumlah apresiasi Budaya Banjar	6	7	8
Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga			
Prestasi pemuda dan Santri dalam Olahraga	268 medali	108 medali	69 medali
Sasaran 5.1.4 : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat			
Rasio pelanggaran perda dan trantibum	1,07	1,92	1,84

Sumber : Bappeda Kab. Banjar, 2023

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

1.2.1. Prioritas Nasional Tahun 2024

Tema RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya prioritas Nasional (PN) sama dengan tahun sebelumnya yakni sebagai berikut :

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Dengan program prioritas :

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
- peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- pengentasan kemiskinan; dan
- peningkatan produktivitas dan daya saing.

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan major project Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- pembangunan rendah karbon.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

- meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kalimantan Tahun 2024

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis
2. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi.
3. Mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
4. Mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.
5. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
6. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan output sektor ekonomi non tradisional, perdagangan antarwilayah, kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

1.2.2. Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengatasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Lingkungan Hidup
Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana (banjir dan kebakaran hutan lahan).
- b. Infrastruktur
Belum mantapnya infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi (termasuk energi dan konektivitas)
- c. Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia
- d. Ekonomi
Belum terdiversifikasinya sektor ekonomi di Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi struktur ekonomi daerah (pertanian, pariwisata, hilirisasi komoditas unggulan, dan pelaku UMKM)
- e. Tata Kelola Pemerintahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital
- f. Gerbang Ibu Kota Negara Baru dan Food Estate
Kalimantan Selatan memiliki peluang besar menjadi gerbang food estate di Kalteng dan ibu kota negara di Kaltim (jalur logistik dan *konektivitas*)

Tema Pembangunan yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah:

**“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”**

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal dengan target pembangunan ekonomi yang tumbuh secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU”.

Tema tersebut dijabarkan melalui beberapa prioritas sebagai berikut:

1. **Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata**, dengan sub prioritas, yakni:
 - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
 - f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing**, dengan sub prioritas:
 - a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - c. Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Dan Inklusif
 - d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - e. Pengendalian Prevalensi Stunting
 - f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - g. Peningkatan Prestasi Olahraga
 - h. Pengembangan Budaya Daerah
3. **Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah**, dengan sub prioritas :
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
 - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN
4. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik**, dengan sub prioritas :
 - a) Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
 - c) Pelaksanaan Pilkada Serentak
 - d) Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
 - e) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - f) Pengembangan Satu Data Kalsel
5. **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana**, dengan sub prioritas :
 - a) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b) Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

1.2.3. Sustainable Development Goal's (SDG'S)

Kewajiban Daerah lainnya didalam perencanaan pembangunan adalah mempertimbangkan pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals). Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia. OPD agar memprioritaskan program dan kegiatan mendukung pencapaian SDG's. 17 Tujuan SDG's adalah:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajarseumur hidup untuk semua
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
- 6) Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan

- 7) Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- 10) Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- 11) Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
- 16) Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

1.2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penerapan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD harus memprioritaskan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM yaitu:

1. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Pendidikan
 - a. Pendidikan Dasar : Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
 - b. Pendidikan Kesetaraan : Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini : Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
2. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Kesehatan
 - a. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin : Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita : Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan
 - e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar : Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif : Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut : Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.

- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi : Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus : Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat : Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis : Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan : Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.
3. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari : Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
 4. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana : Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni.
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten : Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
 5. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Trantibumlinmas
 - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 6. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Sosial
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti : Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti : Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti : Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti : Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana : Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2024

Prioritas pembangunan tahun 2024 untuk mengatasi isu strategis daerah, Pada Bab II telah diuraikan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD Kabupaten banjar sampai tahun

2023 serta permasalahan-permasalahan pembangunan. Diperoleh rumusan isu strategis daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut;

1. Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai secara optimal
2. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu didorong dengan optimal
3. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur layanan dasar yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan belum terpenuhi secara optimal
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik dan bersih belum dilaksanakan secara optimal
5. Penguatan karakter agamis, dan kehidupan masyarakat yang demokratis masih perlu didorong dan ditingkatkan

RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024, disusun melalui koordinasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, termasuk melalui evaluasi dokumen perencanaan pembangunan nasional. Proses penyusunan RKPD mengacu pada RKP dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini, tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 ditentukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD, RKP dan RKPD Provinsi Kalsel.

Tema yang ditetapkan pada RKPD Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah **“Peningkatan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”** makna yang dimaksud pada tema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ **Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh** merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan mengakui peran penting dari pelaku ekonomi lokal dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dan mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi di dalam masyarakat. Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh dapat mencakup pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal. Hal ini termasuk pelatihan kewirausahaan, akses ke sumber daya modal, serta dukungan untuk mempromosikan produk-produk lokal dan meningkatkan daya saing.
- ✓ **Mandiri** maksudnya mengedepankan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di wilayahnya, memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan yang dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- ✓ **Berdaya saing** maksudnya memperkuat posisi UMKM dalam pasar domestik dan global, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pendukung, pelatihan dan pendampingan pengembangan UMKM, pemberian akses modal dan teknologi, serta promosi produk lokal di pasar domestik dan internasional. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan kebijakan yang memperkuat posisi UMKM dalam pasar, seperti pengurangan biaya produksi, pemberian insentif pajak, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Tema RKPD Kabupaten Banjar 2024 diselaraskan dengan tema RKPD Provinsi dan RKP tahun 2024. Sinkronisasi antara RKPD Kabupaten dan RKPD Provinsi penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara lebih luas, serta untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Proses sinkronisasi dan harmonisasi RKPD Kabupaten Banjar 2024 dengan RPJMD dan RKPD Provinsi serta RKP tahun 2024 melalui program dan kegiatan. RPJMD Kabupaten Banjar menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banjar 2024. RKPD Kabupaten Banjar 2024 disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD.

Adapun gambaran penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Penyelarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Banjar Tahun 2024

Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan

Indikator makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 dengan menyelaraskan target indikator makro RKP dan RKPD Prov. Kalsel Serta dokumen RPJMD Kab. Banjar 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3. Keselarasan Indikator Makro antara RKP, RKPD Prov. Kalsel dan RKPD Kab. Banjar Tahun 2024

Indikator	Realisasi 2022	Target 2022		Target 2023			Target 2024		
		RKPD	RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	Prov. Kalsel	Nas untuk Kalsel
Indeks Pembangunan Manusia	70,72	70,18	70,18	70,64	70,64 71,175*	71,09	71,63-72,00	72,65	-
Indeks Pembangunan Gender	-	92,03	92,03	92,17	92,17	92,32	92,32	-	-
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,48	3,24	2,50%	2,80%	3,42 4,29-5,73*	3,53	4,92-6,05	4,6 - 5,0	4,8 - 5,2
Pendapatan Per Kapita (Rp)	21.815.939	20.882.000	20.882.000	21.177.000	21.177.050	21.628.000	21.628.000	-	-
Persentase Penduduk Miskin (%)	2,79	2,83	2,83	2,72	2,72	2,70	2,70 -2,65	4,40 – 4,22	3,0 – 3,3
Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,72	0,313	3,13	0,312	3,09	3,06	2,66	4,05	3,7 – 4,4
Indeks Gini	0,300	0,311	3,11	3,09	0,312	0,311	0,298	0,324	-
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03	61,93	61,93	62,25	69,00 62,25*	62,58	62,58	70,44	-

* akan dilakukan penyesuaian pada RKPD Perubahan 2023

Sumber : RPJMD Kab. Banjar 2021-2026, Rakortekrenbang Prov. Kalsel dan Ranwal RKP 2024

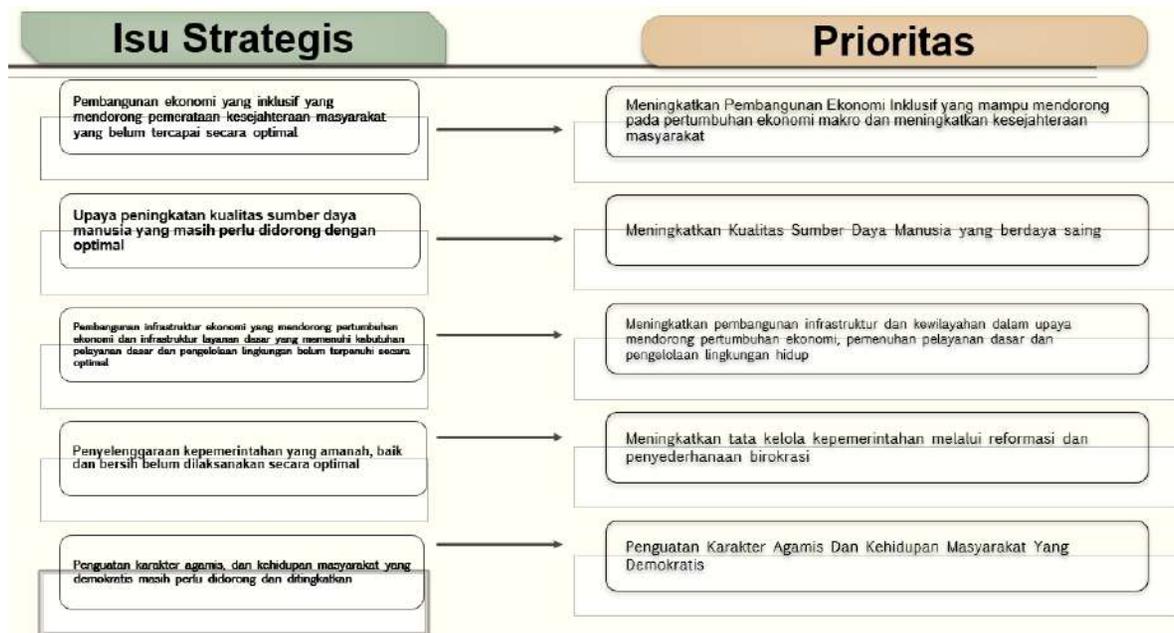
4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2024

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 juga berpedoman pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2024 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Dengan memperhatikan uraian diatas maka ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,** dengan sub prioritas:
 - a. Peningkatan investasi di Kabupaten Banjar melalui realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan.
 - b. Pengembangan pariwisata yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik lokal, regional maupun internasional.
 - c. Mengembangkan ekonomi kreatif yang mampu mendorong peningkatan UMKM berbasis sumber daya lokal dan digital.
 - d. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mampu mendorong ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan.
 - e. Penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program komplementer, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor terkait, dan penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.
 - f. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam upaya penguatan pasar lokal.
 - g. Peningkatan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mandiri berbasis potensi dan sumber daya lokal.
 - h. Penajaman strategi ekspor dan impor dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing,** dengan sub prioritas:
 - a. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya pada angka partisipasi terhadap Sekolah Menengah Pertama.
 - b. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, khususnya pada layanan preventif dan edukatif bagi, remaja putri, ibu hamil dan menyusui.
 - c. Peningkatan upaya pencegahan pernikahan anak melalui edukasi dan advokasi bagi orangtua dan anak.
 - d. Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kader dan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
 - e. Peningkatan cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui strategi yang kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan.
 - f. Mendorong penyediaan pangan, khususnya penyediaan pangan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau.
 - g. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup,** dengan sub prioritas:
 - a. Peningkatan layanan infrastruktur dasar yang mendorong pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
 - b. Peningkatan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.
 - c. Peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

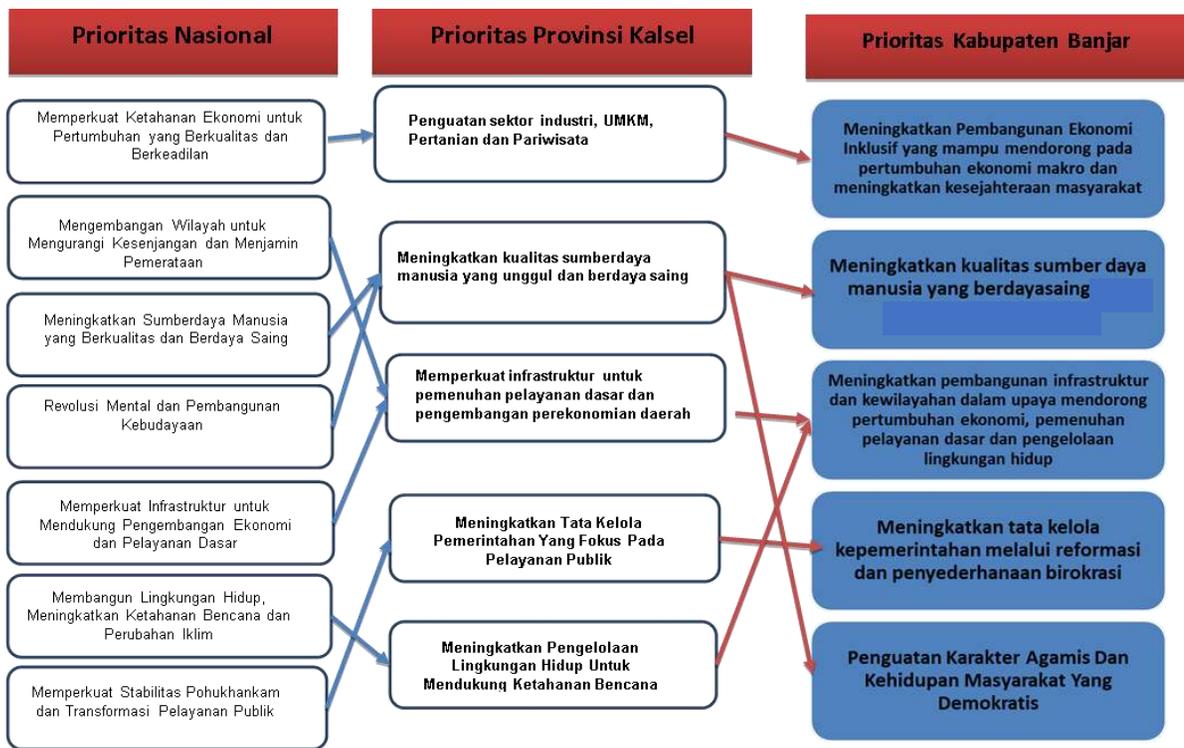
- d. Peningkatan pembangunan berbasis kawasan strategis (prioritas) dan perdesaan yang mendorong pemerataan ekonomi wilayah.
 - e. Peningkatan pengelolaan kebencanaan berbasis mitigasi dan rehabilitasi yang sinergi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan.
- 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi, dengan sub prioritas:**
- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - b. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sektor-sektor pendapatan.
 - c. Pengembangan Satu Data untuk pembangunan dan informasi statistik.
 - d. Peningkatan Kompetensi ASN sebagai upaya terwujudnya ASN yang profesional dan BERAKHLAK.
 - e. Penerapan Sistem remunerasi yang lebih adil dan kompetitif.
 - f. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi.
- 5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dengan sub prioritas:**
- a. Peningkatan penyelenggaraan even keagamaan dan kebudayaan dalam upaya mendorong karakter religius dan agamis.
 - b. Pembentukan pemuda berkarakter
 - c. Peningkatan partisipasi pemuda dan santri dalam pembangunan daerah dan olahraga.
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah
 - e. Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun gambaran keselarasan antara Isu strategis dengan prioritas Daerah tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:



Gambar 4. 1. Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Kab. Banjar

Selain itu pemilihan prioritas juga memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan Provinsi dan Prioritas pembangunan Nasional, dengan mempertimbangkan substansi dari setiap prioritas pembangunan tersebut, maka keselarasan antar prioritas pembangunan RKP Kabupaten Banjar tahun 2024 dengan RKP dan RKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat diilustrasikan melalui gambar berikut :



Gambar 4. 2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Tahun 2024
Sumber: Tim RKP

Dalam perencanaan pembangunan, tidak dapat dipisahkan Sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026, namun target pada tahun 2024 juga disesuaikan dengan hasil pencapaian tahun 2022 dan hasil kesepakatan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel. Keselarasan prioritas dan sasaran RPJMD dan target tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4. Keselarasan prioritas dan sasaran RPJMD dan target tahun 2024

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	RPJMD			RKPD
					2023	2024	2024	
1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	0,23%	2,25%	2,50%	2,50%	
		Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	3,05%	2,02%	2,07%	4.73%	
			Jumlah kunjungan wisatawan	2.105.450	4.250.000	4.500.000	4.500.000	
		Sasaran 2.2.1 : Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.72%	3,09%	3,06%	2.66	
		Sasaran 2.2.2 : Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	37.73%	39,64%	42,34%	42,34%	
			Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	10.87%	10,72%	13,69%	13,69%	
		Sasaran 2.2.3 : Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Petani (NTP)	105.88	104,36	104,90	104,90	
		Sasaran 2.2.4 : Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	15%	17%	20%	20%	
Sasaran 2.2.5 : Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6679	0,6793	0,6907	0,6907			
Sasaran 2.2.6 : Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	72,22%	82,14%	86,84%	86,84%			
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan	Indeks Kesehatan	73,43	73,76	74,15	74,15	

		Sasaran 1.1.2 pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	Indeks Pendidikan	61,87	60,79	61,24	62,29
		Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	77,84	78,29	78,53	78,53
		Sasaran 1.1.4 : Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,17	80,29	80,39	80,39
		Pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,24	81,52	82,02	82,02
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,52	67,43	69,24	69,24
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas	66	72,70	75,46	75,46
		Sasaran 2.2.7 : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	75.34	74,74	76,14	76,14
		Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94.51	94,519	94,526	94,526
		Sasaran 3.1.2 : Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9.33	9,52%	9,36%	9,36%
		Sasaran 3.1.3 : Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	151.6	150,6	149,6	149,6
		Sasaran 3.1.4 : Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup	Jumlah pelanggaran Lingkungan Hidup	0	0,00	0,00	0,00
No.	Prioritas	Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	RPJMD		RKPD
					2023	2024	2024
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi,	Sasaran 4.1.1 : Terselenggaranya Reformasi sumber- sumber pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	8.29	4%	4%	4%
		Sasaran 4.1.2 : Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.97	85,00	86,00	86,00
		Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	68.03	74,49	76,32	76,32
		Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		Sasaran 4.1.4 : Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4.06	3.19	3,31	3,31
		Sasaran 4.1.5 : Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	40,26	61.50	65,50	65,50
		Sasaran 4.1.6 : Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,20	2.56	2,40	2,40
5	Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis	Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat	0	0	0	0
		Sasaran 5.1.2 : Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar;	Jumlah apresiasi Budaya Banjar	6	6	8	8
		Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan Santri dalam Olahraga	166 medali	268 medali	69 medali	69 medali
		Sasaran 5.1.4 : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran perda dan trantibum	2,01	1.07	1,84	1,84

Sumber : Tim RKPD

4.5. Program Prioritas RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024

Selanjutnya prioritas di atas diimplementasikan melalui program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Prioritas Daerah Dan Program Tahun 2024

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD	Target RKPD	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	18,75%	18,75%	DKUMPP
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9,00%	9,00%	DKUMPP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	92,49%		DKUMPP
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	10,00%		DKUMPP
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	8,39%		DKUMPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan produktivitas komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura unggulan	1,12%		DISTAN
			Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan	0,10%		
			Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	2,70%		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	77,00%	77,00%	DISTAN
			Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan	20,00%	20,00%	
			Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar	0,31%	0,31%	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri	4,30%		DISTAN
		Program Pengelolaan	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	54,923	54,923	DKPP

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD	Target RKPD	Penanggung Jawab
		Perikanan Budidaya				
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	61,02	61,02	DKPP
			Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan	8,00%	8,00%	DKPP
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase destinasi wisata yang representatif	52,00%	52,00 %	DISBUDPORAPAR
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	10%	10%	DISBUDPORAPAR
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.21.189		DISNAKER
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	27,00%		DISNAKER
		Program Pemberdayaan Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	100%	100%	DINSOS,P2KBP3A
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	15,75%	15,75%	DINSOS,P2KBP3A
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	60%	60%	DINSOS,P2KBP3A
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	62,44%	62,44%	DINSOS,DP2KB P3A
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	4,33%	4,33%	DPMD
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	62,09%	62,09%	DPMD

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD	Target RKPD	Penanggung Jawab
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	87,45%	87,45%	DPMD
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing					
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Harga Pangan	≤15		DKPP
			Ketersediaan Pangan Utama	34,84%		
			Skor PPH Konsumsi	76,74%		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00%	52,00%	DINKES
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	88,00%	88,00%	DINKES
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah (APS) SD	99,88%	99,88%	DISDIK
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP	89,00%	89,00%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100%	100 %	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	89,80%	89,80%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,32%	99,32%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	80,10%	80,10%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	64,74	64,74	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru - Siswa PAUD	18	18,00	DISDIK
			Rasio Guru - Siswa jenjang SD	12,84	12,84	DISDIK
			Rasio Guru - Siswa jenjang SMP	10,33	10,33	DISDIK
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks PUG	0,6375	63,75%	DINSOS,P2KBP 3A
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	20%	20%	DINSOS,P2KBP 3A

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD	Target RKPD	Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga berkualitas	15,00%	15,00%	DINSOS,P2KBP 3A
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup					
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	73,54%	73,54%	DPUPRP
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase	46,41%	46,41%	DPUPRP
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	82,64%	82,64%	DPUPRP
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	82,27%		DPUPRP
			Persentase Akses Sanitasi Aman	8,15%	8,15%	
			Persentase Akses Sanitasi Layak	82,27%	82,27%	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	74,67%	74,67%	DPUPRP
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,18%	92,18%	DPUPRP
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang	100,00%	100,00%	DPUPRP
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	70,15%	70,15%	DISHUB
			Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75,00%	75,00%	
			V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,38	0,38	
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan	100,00%	100,00%	DISPERKIM LH
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	20,23%	20,23%	DISPERKIM LH

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD	Target RKPD	Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24,30%	24,30%	DISPERKIM LH
		Program Penanggulangan Bencana	Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,39	0,39	BPBD
	Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana		0,68	0,68		
	Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana		0,54	0,54		
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran Air	5,2	5,2	DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	100,00%	100,00%	DLH
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	96%	96%	BAPENDA
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,27%	99,27%	DISDUKCAPIL
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	89,00%	89,00%	DISDUKCAPIL
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00%	100,00%	DPMPPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	20,00%	20,00%	DPMPPTSP
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	9,53%	9,53%	DISPERSIP
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	82,6	82,60	

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD	Target RKPD	Penanggung Jawab
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	60	60	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	75	75	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas	100%	100	SEKRETARIAT DPRD
			Persentase fasilitasi pelaksanaan asesmen	100%	100	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	83,00%	83,00%	RSUD RATU ZALECHA
			Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar	80,00%	80,00%	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	Kecamatan
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	BAPPEDALITB ANG
			Persentase Perencanaan Daerah yang Selaras	100%	100%	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	78,15	78,15	BAPPEDALITB ANG
			Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA	79,02	79,02	
			Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	75,03	75,03	

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD	Target RKPD	Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	90,73%	90,73%	BPKPAD
			Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	98,14%	98,14%	
			Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	87,03%	87,03%	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	88,88%		BPKPAD
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	76	76	INSPEKTORAT
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4,3	4,3	INSPEKTORAT
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	42,2		BKDPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kompetensi	23,3	23,3	BKDPSDM
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	71%	71%	DISKOMINFO
		Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	44,71%		DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan Persendian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	190		DISKOMINFO
5	Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis					
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	0,12%	0,12%	KESBANGPOL

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD	Target RKPD	Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	0,23%	0,23%	KESBANGPOL
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	66,67%	66,67%	DISBUDPORAPAR
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	38,75%	38,75%	DISBUDPORAPAR
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Penanganan Terhadap Tramtibum, Perda/Perkada dan LinMas	100%	100%	SATPOL PP, DPKPP

Sumber : Tim RKPD